



REFORMASI
HUKUM



icare



LKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA**

Jalan Abunawas No. 7 A Telepon (0401) 3122132 – Faksimile (0401) 312340
Laman : <http://www.sultra.kemenkumham.go.id> – Email : ppl_sultra@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi, serta tujuan dan sasaran dalam rangka pelaksanaan *good governance*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dan Perencanaan Kinerja Tahun 2020.

Tahun 2020 adalah tahun Pertama pelaksanaan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020. Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM berkewajiban mendukung dan melaksanakan program-program unit eselon I melalui rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020. Melalui rencana strategis dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang hukum dan HAM.

Sesuai dinamika perkembangan yang terjadi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut telah menggantikan peraturan yang lama yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana kedua peraturan yang lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.



Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Kendari, 30 Desember 2020

SK Kepala Kantor Wilayah *f*

Silvester Sili Laba, S.H.
NIP. 19670106 199303 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara tahun 2020. Dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam periode 2020, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara pada tahun 2020, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar **Rp. 21,836,324,000,-** dan mempunyai 9 (sembilan) "DIPA".

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dilakukan pada 9 program dengan menggunakan sasaran program dan sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain:



No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
Program Meningkatkan Layanan Dokumen Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara			
1	Meningkatnya Layanan Dokumen Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
			Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan
			Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu
			Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel
			Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan
			Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel
			Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat
			Jumlah Layanan Perkantoran
Program Meningkatkan Pelayanan Keimigrasian			
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Maningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
2		Meningkatkan Penegakan Hukum Keimigrasian	Presentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian
3		Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian
	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian		
Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di Wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan di wilayah





No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
2		Terlaksananya Supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan di Wilayah	Persentase UPT Pemasarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar
3		Terwujudnya Produktivitas Narapidana menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat
4		Terwujudnya Mantan Narapidana Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Presentase Residivis
5		Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Presentase Anak yang melanjutkan Pendidikan
Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			
1	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Jumlah penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah
		Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah
			Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
Program Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah			
1	Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi
2		Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan
Program Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah			



No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator
1	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Meningkatnya pembangunan kebijakan yang berspektif HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM
			Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM
			Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM
2		Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Has Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah
Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			
1	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
			Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang / kelompok masyarakat miskin
			Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah
			Jumlah penyuluhan hukum di daerah
			Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah
			Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN
Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			
1	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian / pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
			Hasil penelitian / pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah

Dalam mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja dimaksud Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata



pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.





Daftar Isi

BAB I	13
PENDAHULUAN	13
A. LATAR BELAKANG	13
B. SELAYANG PANDANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA.....	14
C. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA	15
D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	16
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	18
1. DIVISI ADMINISTRASI.....	19
2. DIVISI PEMASYARAKATAN	21
3. DIVISI KEIMIGRASIAN.....	24
4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.....	26
5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.....	31
F. UNIT PELAKSANA TEKNIS	31
BAB II.....	34
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	34
A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020	34
1. VISI, MISI DAN TATA NILAI	34
2. TUJUAN	36
3. SASARAN STRATEGIS	39
4. PROGRAM DAN ANGGARAN.....	39
5. INDIKATOR KINERJA SASARAN	41
B. PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH TAHUN 2020	46
BAB III	49
AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR WILAYAH	49
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	49
1. CAPAIAN KINERJA DIVISI ADMINISTRASI	49
2. CAPAIAN KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN.....	76
3. CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	82
4. CAPAIAN KINERJA DIVISI PEMASYARAKATAN	108
B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)	125



1. DIVISI ADMINISTRASI	125
2. DIVISI IMIGRASI	126
3. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	128
4. DIVISI PEMASYARAKATAN	134
BAB IV	135
KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA	135
A. KESIMPULAN	135
B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA	135
Lampiran	
Daftar Tabel	
<i>Tabel 1 1 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 1 2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 1 3 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 1 4 Jumlah pegawai berdasarkan Eselon.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 1 5 Daftar Unit Pelaksana Teknis.....</i>	<i>32</i>
<i>tabel 2 1 Hubungan Antara Misi dan Tujuan.....</i>	<i>36</i>
<i>tabel 2 3 Program dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2020.....</i>	<i>39</i>
<i>tabel 2 4 Program Meningkatnya Layanan Dokumen Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.....</i>	<i>41</i>
<i>tabel 2 5 Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah</i>	<i>42</i>
<i>tabel 2 6 Program Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian.....</i>	<i>43</i>
<i>tabel 2 7 Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah.....</i>	<i>44</i>
<i>tabel 2 8 Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah.....</i>	<i>44</i>
<i>tabel 2 9 Program Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah.....</i>	<i>44</i>
<i>tabel 2 10 Program Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah.....</i>	<i>45</i>
<i>Program : Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah tabel 2 11 Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah.....</i>	<i>45</i>
<i>tabel 2 12 Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah..</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 3 1 Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.....</i>	<i>49</i>
<i>Tabel 3 2 Hasil Survey Kepuasan Layanan Internal Tahun 2020</i>	<i>49</i>
<i>Tabel 3 3Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.....</i>	<i>50</i>
<i>Tabel 3 4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.....</i>	<i>51</i>
<i>Tabel 3 5 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan</i>	<i>52</i>



Tabel 3 6 Indikator output jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	52
Tabel 3 7 Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	54
Tabel 3 8 Tabel Pengangkatan PNS	55
Tabel 3 9 tabel rincian kenaikan pangkat	56
Tabel 3 10 Tabel Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	56
Tabel 3 11 Tabel Pembinaan Pegawai	57
Tabel 3 12 Tabel Hukuman Disiplin	57
Tabel 3 13 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	57
Tabel 3 14 Data Pegawai Berdasarkan Golongan	58
Tabel 3 15 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
Tabel 3 16 Data Jumlah Pegawai Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	58
Tabel 3 17 Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	59
Tabel 3 18 Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan UPT	60
Tabel 3 19 Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	62
Tabel 3 20 Monitoring Pelaksanaan BMN	63
Tabel 3 21 Penetapan Status Pengguna BMN	64
Tabel 3 22 Jumlah Layanan Ketatausahaan yang Akurat dan Akuntabel	66
Tabel 3 23 Surat Masuk Keluar	66
Tabel 3 24 Jumlah Informasi Kegiatan Kantor Wilayah yang Disebarluaskan/ Dipublikasikan kepada Masyarakat	67
Tabel 3 25 Data Jumlah berita tahun 2020	67
Tabel 3 26 Data Humas Link Media Sosial	69
Tabel 3 27 Jumlah layanan perkantoran	74
Tabel 3 28 Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	74
Tabel 3 29 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	76
Tabel 3 30 Data IKM satuan kerja Keimigrasian	76
Tabel 3 31 Persentase penurunan pelanggaran kemigrasian	76
Tabel 3 32 Persentase penurunan pelanggaran kemigrasian	77
Tabel 3 33 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan fungsi Keimigrasian	77
Tabel 3 34 Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan fungsi Keimigrasian	78
Tabel 3 35 Pelayanan paspor	78
Tabel 3 36 Pelayanan KITAS	78
Tabel 3 37 Pelayanan ITK	79
Tabel 3 38 Pengawasan WNA	79
Tabel 3 39 Penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian	80
Tabel 3 40 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)	81
Tabel 3 41 Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah	82
Tabel 3 42 Data PNPB AHU	82
Tabel 3 43 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	83
Tabel 3 44 Data laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris tahun 2020	83
Tabel 3 45 Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui Kantor Wilayah	84
Tabel 3 46 Pelayanan HKI di daerah	84
Tabel 3 47 Tabel Jenis Produk Layanan HKI	85



Tabel 3 48 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah.....	87
Tabel 3 49 Kegiatan Diseminasi dan Promosi KI.....	87
Tabel 3 50 Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.....	89
Tabel 3 51 Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI.....	89
Tabel 3 52 Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi.....	90
Tabel 3 53 Melakukan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah.....	90
Tabel 3 54 Memberikan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik.....	93
Tabel 3 55 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan.....	94
Tabel 3 56 Kegiatan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.....	94
Tabel 3 57 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM.....	95
Tabel 3 58 Kegiatan program aksi HAM.....	95
Tabel 3 59 Jumlah Kabupaten/ Kota Peduli HAM.....	96
Tabel 3 60 Kabupaten Kota Peduli HAM.....	96
Tabel 3 61 Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM.....	97
Tabel 3 62 Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM.....	97
Tabel 3 63 Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah.....	98
Tabel 3 64 Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan Hukum litigasi.....	99
Tabel 3 65 Rekap Bantuan Hukum Litigasi.....	99
Tabel 3 66 Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang / kelompok masyarakat miskin.....	100
Tabel 3 67 kegiatan bantuan non litigasi.....	101
Tabel 3 68 Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah.....	101
Tabel 3 69 Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum.....	102
Tabel 3 70 Jumlah Penyuluh Hukum di Daerah.....	102
Tabel 3 71 Jumlah kegiatan penyuluh hukum di Daerah.....	102
Tabel 3 72 Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah.....	103
Tabel 3 73 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah.....	103
Tabel 3 74 Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIH.....	103
Tabel 3 75 Data Dokumen JDIH tahun 2020.....	104
Tabel 3 76 Promosi Perpustakaan Hukum Online.....	105
Tabel 3 77 Statistik pengguna/ user JDIH.....	105
Tabel 3 78 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.....	106
Tabel 3 79 Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah.....	106
Tabel 3 80 Hasil penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah.....	107
Tabel 3 81 Kegiatan sosialisasi hasil penelitian/ pengkajian Balitbang.....	107
Tabel 3 82 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di Wilayah.....	108
Tabel 3 83 Data Ikm Pada Upt Pemasarakatan Di Wilayah Sulawesi Tenggara.....	108
Tabel 3 84 Persentase UPT Pemasarakatan yang disupervisi.....	109
Tabel 3 85 Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat.....	115
Tabel 3 86 Menurunnya persentase residivis.....	116
Tabel 3 87 Data residivis dewasa.....	117
Tabel 3 88 Persentase Residivis Keseluruhan (Dewasa + Anak).....	117



Tabel 3 89 Persentase anak yang melanjutkan pendidikan.....	118
Tabel 3 90 Anak yang mendapatkan pendidikan	118
Tabel 3 91 Anak yang melanjutkan pendidikan.....	118
Tabel 3 92 Klasifikasi anak.....	119
Tabel 3 93 Data anak yang melanjutkan pendidikan di LPKA kendari.....	119
Tabel 3 94 REKAPITULASI PNBP RESOLUSI PEMASYARAKATAN TAHUN 2020.....	120
Tabel 3 95 Rehabilitas Sosial.....	121
Tabel 3 96 Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat.....	122
Tabel 3 97 Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	122
Tabel 3 98 Persentase anak yang melanjutkan pendidikan.....	123
Tabel 3 99 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Divisi Administrasi.....	125
Tabel 3 100 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Divisi Imigrasi	126
Tabel 3 101 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Pembentukan Hukum .	128
Tabel 3 102 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Pembinaan Hukum Nasional.....	128
Tabel 3 103 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	130
Tabel 3 104 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Administrasi Hukum Umum.....	131
Tabel 3 105 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Penelitian dan Pengembangan.....	132
Tabel 3 106 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Pemajuan HAM	132
Tabel 3 107 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Divisi Masyarakat.....	134

Daftar Bagan

Bagan 1 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	18
--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2019 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi

Tenggara sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI di Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020

B. SELAYANG PANDANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pertama kali dibentuk pada tahun 1982 dengan nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.03.PR07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-03.PR-07.10 Tahun 1992.

Kepala Kantor Wilayah dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi. Divisi-divisi tersebut terdiri dari:

1. Divisi Administrasi, yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
2. Divisi Pemasarakatan, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan;
3. Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi;
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang

Pelayanan Hukum dan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah pada saat ini meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi 17 Kota/Kabupaten yang terdiri dari 2 Lapas Kelas IIA, 1 Lapas Khusus Anak kelas II, 1 Lapas Kelas III, 1 Kantor Imigrasi Kelas I, 1 Rutan Kelas IIA, 3 Rutan Kelas IIB, 2 Balai Pemasarakatan Kelas II, 1 Rupbasan Kelas 1 dan 2 Kantor Imigrasi Kelas III.

C. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2020.

Tabel 1 1 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Pria	Wanita	Jumlah
677	230	907

2. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementeraian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Berdasarkan Pangkat

Tabel 1 2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat

GOLONGAN						JUMLAH
IV		III		II		
L	P	L	P	L	P	
31	2	377	138	269	90	907

3. Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementeraian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 1 3 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN																		JUMLAH
SLTP		SLTA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		NO DATA		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	0	341	99	0	1	1	2	27	22	0	1	256	92	51	8	0	5	907

Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Kantor Wilayah Kementeraian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Berdasarkan Eselon

Tabel 1 4 Jumlah pegawai berdasarkan Eselon

PEJABAT ESELON								JUMLAH
II		III		IV		V		
A	B	A	B	A	B	A	B	
1	4	11	0	41	4	57	0	118

D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah dan dibantu oleh para kepala divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;



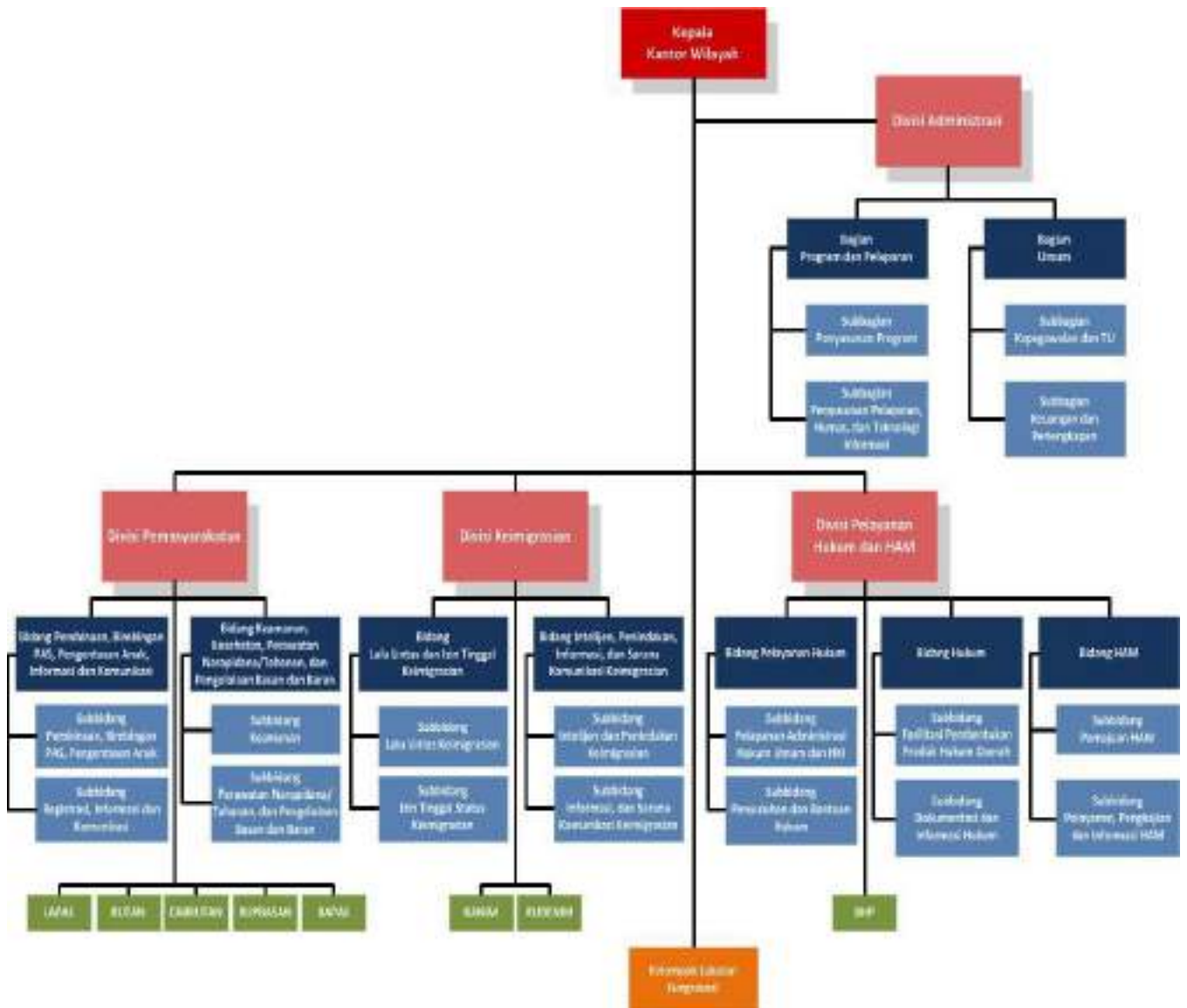
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang Masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.



E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dijelaskan sebagai berikut :

Bagan 1 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



1. DIVISI ADMINISTRASI

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri dari:

a. **Bagian Program dan Hubungan Masyarakat**

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data hubungan antar lembaga serta evaluasi dan laporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- 3) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- 4) Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Penyusunan Program dan Hubungan Masyarakat dibantu oleh:

- 1) Subbagian Program dan Pelaporan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.
- 2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, yang mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian,
- 2) Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik negara,
- 3) Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan

4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga,

Bagian Umum dibantu oleh:

- 1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.
- 2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di Lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

a. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang Pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi dibantu oleh :

- 1) Subbidang Pembinaan Teknologi Informasi dan Kerja Sama, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama.
- 2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

b. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban dibantu oleh :

- 1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi,
- 2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan,

evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara keamanan dan ketertiban.

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Dalam melaksanakan segenap tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri :

a. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- 2) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dibantu oleh:

- 1) Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Perizinan Keimigrasian.
- 2) Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian

b. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- 2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dibantu oleh:

- 1) Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan persiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.
- 2) Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan persiapan bahan penyelidikan dan penindakan keimigrasian.

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum

- di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

a. Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum dibantu oleh :

- 1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pemninaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

b. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan

hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan

- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum dibantu oleh :

- 1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.
- 2) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

c. Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia dibantu oleh :

- 1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi

dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia.

- 2) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah. Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Divisi Terkait.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara terdiri atas 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis diantaranya:

Tabel 1 5 Daftar Unit Pelaksana Teknis

No.	Unit Pelaksana Teknis	Eselon	Alamat
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari	III A	Jln. Kapten Pierre Tendean No.1
2	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau	III A	Jln. Jend. Sudirman No. 66 A
3	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	III A	Jln. Jend. Ahmad Yani No. 101
4	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari	IVA	Jln. Letjen R. Soeprapto No. 112 Kendari
5	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Unaaha	IVA	Jln. Pemasyarakatan Desa Lalonggowuna Kec. Tongauna Kab. Konawe
6	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka	IVA	Jln. Pendidikan No.83 Kel. Balandete Kab. Kolaka
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha	IVA	Jl.Pelangi Desa Lasalepa Kabupaten Muna
8	Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari	IVA	Jl. Pasaeno No. 9 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari
9	Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau	IVA	Jln. S. Dayanu Ikhsanuddin No. 125 Baubau
10	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari	IVA	Jln. Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari.
11	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	IVA	Jl. Moh. Husni Tamrin No. 32, Tomba, Wolio, Kota Bau-Bau
12	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	IVA	Jl. Adhyaksa No. 34 Numana Kec Wangi-Wangi Selatan Wanci
13	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari	IIIB	Jln. Kapten Pierre Tendean No.1



No.	Unit Pelaksana Teknis	Eselon	Alamat
14	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari	IVA	Jln. Kapten Pierre Tendean No.1



BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun.

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI, MISI DAN TATA NILAI

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan tangan

Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, maka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara mendukung dan melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara juga mendukung dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pernyataan visi, misi dan tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (personal values), diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses pelayanan prima (process values), dan dikembangkan oleh setiap pimpinan unit kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (leadership values).

Tata Nilai yang bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini perlu dikembangkan dalam diri setiap pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Sulawesi Tenggara dalam rangka mencapai keunggulan. Tata Nilai tersebut antara lain :

1. **Profesional**, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. **Akuntabel**, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
4. **Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. TUJUAN

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM RI adalah;

tabel 2 1 Hubungan Antara Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;	<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi- Menumbuhkan Kewirausahaan- Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;	<ul style="list-style-type: none">- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;	<ul style="list-style-type: none">- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi- Mitigasi Perubahan Iklim- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

No	Misi	Tujuan
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Ideologi Pancasila - Revitalisasi Revolusi Mental - Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial - Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya - Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan - Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan Penataan Regulasi - Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum - Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM - Mengembangkan Budaya Sadar Hukum
7	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif - Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional - Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya
8	Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualisasi Demokrasi Pancasila - Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional - Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi - Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien - Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Reformasi Pelayanan Publik
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis - Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah - Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelanyanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

3. SASARAN STRATEGIS

Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

4. PROGRAM DAN ANGGARAN

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020. Sebanyak 9 (sembilan) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran pada tahun 2020 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

tabel 2 2 Program dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2020

No	Program	Nomor dan Tanggal DIPA	Pagu Semula (dalam ribuan)	Pagu Revisi (dalam ribuan)	PELAKSANA
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	SP DIPA-013.01.2.409201/20120. Tanggal 12 November 2019	14.648.634	17.936.168	Divisi Administrasi
2	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	SP DIPA-013.06.2.409203/2020. Tanggal 12 November 2019	1.428.639	1.428.639	Divisi Keimigrasian

No	Program	Nomor dan Tanggal DIPA	Pagu Semula (dalam ribuan)	Pagu Revisi (dalam ribuan)	PELAKSANA
3	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	SP DIPA-013.05.2.409202/2020. Tanggal 12 November 2019	785.630	785.630	Divisi Masyarakat
4	Program Administrasi Hukum Umum	SP DIPA-013.03.2.409200/2020. Tanggal 12 November 2019	2.128.000	2.128.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	SP DIPA-013.07.2.409204/2020. Tanggal 12 November 2019	704.732	704.732	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
6	Program Pembentukan Hukum	SP DIPA-013.08.2.409205/2020. Tanggal 12 November 2019	119.187	119.187	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
7	Program Pembinaan Hukum Nasional	SP DIPA-013.10.2.409207/2020. Tanggal 12 November 2019	1,723,869	1.821.229	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
8	Program Pemajuan HAM	SP DIPA-013.09.2.409206/2020 Tanggal 12 November 2019	239.412	239.412	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
9	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	SP DIPA-013.11.2.409208/2020. Tanggal 12 November 2019	58.221	58.221	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
TOTAL			21.836.324	25.221.218	

Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2020 untuk tahun 2020 mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan dan program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran awal Pagu DIPA Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 21,836,324,000,-**

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun indikator kinerja sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2020 pada perencanaan kinerja dibawah ini.

PERENCANAAN KINERJA DIVISI ADMINISTRASI

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
Program : Program Meningkatnya Layanan Dokumen Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

tabel 2 3 Program Meningkatnya Layanan Dokumen Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Meningkatnya Layanan Dokumen Manajemen di	Meningkatnya layanan dokumen manajemen di	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85
	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	1 Layanan
		Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	1 Layanan
		Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	1 Layanan
		Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	1 Layanan
		Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/ dipublikasikan kepada masyarakat	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

PERENCANAAN KINERJA DIVISI PEMASYARAKATAN

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Program : Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

tabel 2 4 Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di Wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di wilayah	7.0
	Terlaksananya Supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di Wilayah	Persentase UPT Pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	90%

Terwujudnya Produktivitas Narapidana menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	100%
Terwujudnya Mantan Narapidana Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Presentase Residivis	1
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Presentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	55%

PERENCANAAN KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
Program : Program Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian

tabel 2 5 Program Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Maningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	7,3	
	Meningkatkan Penegakan Hukum Keimigrasian	Presentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian		9 kegiatan
		Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian		12 LHK

PERENCANAAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
Program : Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

tabel 2 6 Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	3.0
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%

Program : Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

tabel 2 7 Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah	10 Permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus

Program : Program Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah

tabel 2 8 Program Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	20 Raperda

Pa

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	17 orang

Program : Program Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah
tabel 2 9 Program Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berspektif HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	1 Kab / Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Has Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi

Program : Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
tabel 2 10 Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	138 Orang
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang / kelompok masyarakat miskin	17 Orang
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah

Pa

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah

Program : Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

tabel 2 11 Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian / pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
		Hasil penelitian / pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku

B. PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH TAHUN 2020

Nilai prosentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Sulawesi Tenggara telah membuat suatu perjanjian kinerja pada akhir Desember 2019 (Terlampir).

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

- ✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- ✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Tujuan

Tujuan umum ditetapkan Perjanjian Kinerja adalah:

- Intensifikasi pencegahan korupsi
- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

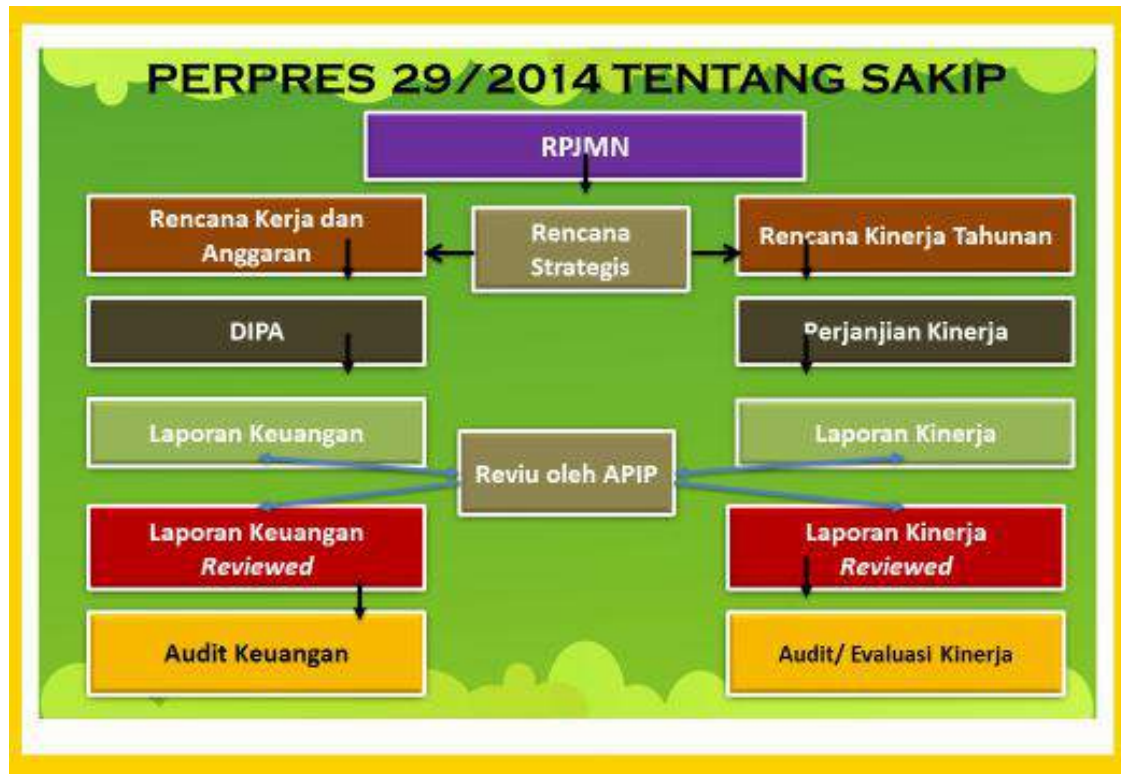
2. Ruang lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

3. Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

gambar 2 1 Gambar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



BAB III AKUNTABILITAS KIERJA KANTOR WILAYAH

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. CAPAIAN KINERJA DIVISI ADMINISTRASI

a. Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (W.01.1.a)

Tabel 3 1 Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	9,39	132%	7,1	8,5	119,7%

Analisis:

Target pada tahun sebelumnya dan tahun ini masih sama yaitu 7,1 Realisasi tahun 2019 sebesar 9,39 sehingga capaiannya 132%. Sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar 8,5 sehingga capaiannya sebesar 119,7%. Penurunan capaian ini dikarenakan pada tahun lalu hanya ada data survey triwulan IV sedangkan pada tahun ini data lengkap survey triwulan I sampai dengan triwulan IV.

Tabel 3 2 Hasil Survey Kepuasan Layanan Internal Tahun 2020

Keterangan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Integritas	8,3	8,4	8,6	8,7
Sistem Anti Korupsi	8,3	8,4	8,6	8,7
SDM	8,3	8,3	8,6	8,7
Anggaran	8,2	8,3	8,5	8,6
Aturan dan Norma	8,4	8,5	8,6	8,7
Rata-Rata	8,3	8,4	8,6	8,7
Rata-rata seluruh	8,5			

b. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (W.01.1.b)

Tabel 3 3Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	90	90,53	100,6%	85	Tidak ada penilaian di Kanwil penilaian dilakukan di Pusat dan belum ada penilaian	Tidak ada penilaian di Kanwil penilaian dilakukan di Pusat dan belum ada penilaian

Analisis:

Target pada tahun sebelumnya dan tahun ini mengalami penurunan dari 90 menjadi 85, realiasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2019 sebesar 90,53 sehingga capaiannya sebesar 100,6%. Sedangkan untuk tahun 2020 Tidak ada penilaian di Kanwil, dan belum ada penilaian dilakukan di Pusat.

**c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM (W.01.1.c)**

*Tabel 3 4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM*

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	70	Tidak ada penilaian di pusat	Tidak ada penilaian di pusat	85	Belum ada penilaian di pusat	Belum ada penilaian di pusat

Analisis:

Target pada tahun sebelumnya dan tahun ini mengalami kenaikan dari 70 menjadi 85, belum ada realisasi untuk tahun lalu dan tahun ini sehingga belum dapat diperbandingkan.

d. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan (LDM)

Tabel 3 5 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Analisis:

Target pada tahun sebelumnya dan tahun ini sama, Capaian tahun lalu dan tahun ini juga bertahan 100% hal ini dikarenakan seluruh kegiatan terselenggara dengan baik.

Selama tahun 2020, indikator output tersebut dicapai melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3 6 Indikator output jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan

No	Kegiatan	Output
1	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian / Lembaga (RKA-K/L)	Dokumen RKA-K/L Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 9 program (9 dokumen RKA-K/L) dan 14 dokumen RKA-K/L Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan Hukum yang berlaku.



2.	Penyusunan program dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tersusunnya analisa kebutuhan anggaran tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 9 program (9 dokumen RKA-K/L) dan 14 dokumen RKA-K/L Unit Pelaksana Teknis (UPT)<input type="checkbox"/> Dokumen Disbursement Plan, Procurement Plan, dan Kalender Kerja tahun dan 2021.
3.	Penyusunan Program Aksi (Target Kinerja). B03, B06, B09 dan B12 yang dilaksanakan oleh seluruh Divisi dan Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara untuk di unggah pada laman kinerja.kemenkumham.go.id paling lambat setiap tanggal 5 awal bulan pada setiap triwulan	Laporan Target Kinerja B03, B06, B09 dan B12.



e. Jumlah Layanan Kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu (LDM)

Tabel 3 7 Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100\%$
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Analisis:

Target pada tahun sebelumnya dan tahun ini sama 1 layanan dan realisasinya juga sama 100%, realisasi 100% dapat dipertahankan pada tahun ini karena semua kegiatan layanan kepegawaian terlaksana semua dengan baik.

Capaian kinerja pada Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara selama tahun 2020 telah terealisasi dengan baik. Kantor Wilayah telah melaksanakan layanan kepegawaian selama 12 bulan layanan kepada sejumlah **907** pegawai diseluruh jajaran Kantor Wilayah dan UPT. Capaian layanan kepegawaian dimaksud antara lain :

- 1) Terlaksananya rapat Internal Sub. Bagian Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 2 januari 2020 dihadiri oleh :

1. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
2. Seluruh staff Sub. Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga

Hasil yang dicapai yaitu masing-masing staff kepegawaian mendapatkan uraian tugas pokok dan tugas tambahan.

- 2) Terlaksananya rapat Internal Sub. Bagian Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 28 Februari 2020 dihadiri oleh :

1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Sub.Bagian Kepegawaian
3. Staff Sub. Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga

Hasil yang dicapai yaitu penguatan tugas dan fungsi JFU Kepegawaian dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

- 3) Terlaksananya rapat Internal Sub. Bagian Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 22 Juni 2020 dihadiri oleh :

1. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
2. Seluruh staff Sub.Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga

Hasil yang dicapai yaitu masing-masing JFU kepegawaian mendapatkan tugas untuk menyiapkan data dukung WBK/WBBM .

- 4) Terbitnya SK Cuti Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHAM Sulawesi Tenggara sebanyak 52 orang, dengan rincian sebagaiberikut:

Jenis Cuti	Jumlah		TOTAL
	L	P	
Cuti Tahunan	31	20	51
Cuti Melahirkan	0	1	1
TOTAL	31	21	52

- 5) Terbitnya SK Pengangkatan PNS sebanyak 0 SK Pengangkatan PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 8 Tabel Pengangkatan PNS

No	Jenis Pengangkatan	Jumlah
1	SK Pengangkatan PNS Golongan II (Taruna AKIP)	0
2	SK Pengangkatan PNS Golongan III	6
3	SK Pengangkatan PNS Golongan II	1
JUMLAH		7

- 6) Penyelesaian Kenaikan Pangkat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

- a) Permohonan Kenaikan Pangkat sampai dengan Desember 2020 : 143 Berkas
- b) Permohonan telah dilaksanakan : 142 Berkas
- c) Permohonan yang masih dalam proses : 1 Berkas

- d) Permohonan yang tidak dapat diproses : 0 Berkas
Realisasi : 99%

Ada 1 berkas yang masih dalam proses karena ada revisi nama di SK CPNS dan SK PNS dan akan diusul ulang di tahun 2021.

Berikut ini tabel rincian kenaikan pangkat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2020.

Tabel 3 9 tabel rincian kenaikan pangkat

Kenaikan Pangkat Pegawai			TOTAL
Pilihan	Reguler	Pengabdian	
40	88	14	142

- 7) Telah melaksanakan Ujian dinas dan penyesuaian Ijazah yang diikuti 68 orang pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 10 Tabel Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Jenis Ujian	Peserta Hadir	Peserta Tidak Hadir	Peserta Lulus	Peserta Tidak Lulus
Penyesuaian Ijazah S1	55	0	Belum Pengumuman	Belum Pengumuman
Penyesuaian Ijazah S2	2	0	Belum Pengumuman	Belum Pengumuman
Ujian Dinas Tingkat I	11	0	Belum Pengumuman	Belum Pengumuman
Total	68	0	Belum Pengumuman	Belum Pengumuman

- 8) Penyelesaian pelanggaran disiplin (pembinaan kepegawaian) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8 orang Pegawai, yang terdiri dari proses pengusulan Hukuman disiplin sejumlah 4 orang Pegawai, sudah terbit SK

Hukuman Disiplin sejumlah 2 orang Pegawai dan sedang menjalankan Hukuman disiplin sejumlah 2 orang Pegawai.

Berikut ini tabel rincian kondisi pembinaan pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2020:

Tabel 3 11 Tabel Pembinaan Pegawai

Jenis Pelanggaran Hukuman Disiplin				TOTAL
Narkoba	Penyalahgunaan Wewenang	Tidak Masuk Kerja	Lain-Lain	
4	0	2	2	8

Tabel 3 12 Tabel Hukuman Disiplin

Jumlah Hukuman Disiplin			TOTAL
Ringan	Sedang	Berat	
0	2	6	8

- 9) Terlaksananya promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sejumlah 18 pegawai, dengan rincian 8 (delapan) Pejabat Pelaksana promosi menjadi Pejabat Pengawas dan 10 (sepuluh) Pejabat Pengawas mendapatkan mutasi/ rotasi jabatan.
- 10) Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yaitu 118 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 13 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

PEJABAT ESELON								JFU/JFT	TOTAL	JABATAN KOSONG
II		III		IV		V				
A	B	A	B	A	B	A	B			
1	4	11	0	41	4	57	0	789	907	6

- 11) Data Pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara berjumlah 907 orang pegawai dengan rincian pegawai sebagai berikut :

Tabel 3 14 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

GOL II		GOL III		GOL IV		JUMLAH
L	P	L	P	L	P	
269	90	377	138	31	2	907
359		515		33		907

- 12) Data tingkat pendidikan pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 15 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN																		TOTAL
SLTP		SLTA		D1		D2		D3		D4		S1		S2		NO DATA		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	0	341	99	0	1	1	2	27	22	0	1	256	92	51	8	0	5	907
1		440		1		3		49		1		348		59		5		907

- 13) Data Jumlah Pegawai Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Tabel 3 16 Data Jumlah Pegawai Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Bulan												Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	0	16	1	0	0	0	0	0	4	0	29	52 orang

f. Jumlah Layanan Keuangan yang akurat dan akuntabel (LDM)

Tabel 3 17 Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100\%$
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Analisis:

Target pada tahun sebelumnya dan tahun ini sama 1 layanan dan realisasinya juga sama 100%, realisasi 100% dapat dipertahankan pada tahun ini karena semua kegiatan layanan keuangan terlaksana semua dengan baik.

Pada bidang penganggaran, tahun 2020 ini yang merupakan kelanjutan dari restrukturisasi program dan kegiatan, dimana pada setiap divisi bertanggung jawab langsung kepada unit eselon I nya masing-masing, namun tetap berkoordinasi dengan Divisi Administrasi dalam hal administratif dan fasilitatif. Sehingga, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara khususnya pada Divisi Administrasi sebagai unit yang mempunyai peran strategis yaitu supporting dan koordinator pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan laporan keuangan dan BMN, telah melakukan fasilitasi, pengawasan, dan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat penganggaran pada divisi teknis dan unit pelaksana teknis jajaran Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara.

Pada Aktivitas ini, telah dihasilkan output-output yang mendukung sasaran kinerja dan indikator kinerja antara lain sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya kegiatan Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II untuk Tahun 2019. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Operator SAIBA dan Operator BMN

Wilayah sebanyak 4 orang, Rekon ini dilaksanakan dengan metode koordinasi langsung ke Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Kegiatan menghasilkan data valid dari 14 UPT untuk Rekon Semester II tahun 2019 yang kemudian diolah menjadi Laporan Keuangan Semester II T.A. 2019.

Kegiatan ini menghasilkan output :

- a) Berita Acara Rekonsiliasi sebanyak 23 Berita Acara (9 DIPA Eselon I dan 14 UPT)
- b) Laporan SAIBA Semester II Tahun Anggaran 2019 Satker Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 9 program (9 laporan),
- c) Laporan SAIBA Semester II Tahun Anggaran 2019 sejumlah 14 UPT (14 laporan).

2) Telah dilaksanakannya monitoring pengelolaan SAIBA pada Divisi dan Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Monitoring dilakukan dalam rangka penertiban BMN dan penyamaan data SAIBA UPT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Target monitoring adalah memecahkan masalah keuangan yang ada di UPT sehingga dapat menghasilkan data keuangan yang valid untuk dijadikan laporan keuangan.

Dari 14 Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, telah dilakukan monitoring dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 18 Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan UPT

No	UPT Yang Dilakukan Monitoring	Waktu Pelaksanaan	Hasil / Isi Pembahasan Monitoring (Output)
1	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	NIHIL	NIHIL
2	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kendari	03 Juni 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020
3	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Baubau	NIHIL	NIHIL
4	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	NIHIL	NIHIL

No	UPT Yang Dilakukan Monitoring	Waktu Pelaksanaan	Hasil / Isi Pembahasan Monitoring (Output)
5	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari	08 Juni 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020
6	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Unaaha	NIHIL	NIHIL
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka	27 Juli 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020
8	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha	NIHIL	NIHIL
9	Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari	04 Juni 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020
10	Balai Pemasarakatan Kelas II Baubau	NIHIL	NIHIL
11	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari	NIHIL	NIHIL
12	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II Kendari	05 Juni 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020
13	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari	05 Juni 2020, 09 Juni 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020
14	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	NIHIL	NIHIL
15	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	NIHIL	NIHIL

Kegiatan monitoring ini menghasilkan output laporan monitoring bidang SAIBA berupa pengelolaan SAIBA.

g. Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan (LDM)

Tabel 3 19 Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			AHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Analisis:

Target pada tahun sebelumnya dan tahun ini sama 1 layanan dan realisasinya juga sama 100%, realisasi 100% dapat dipertahankan pada tahun ini karena semua kegiatan layanan BMN terlaksana semua dengan baik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sebagai unit kerja yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan melakukan fasilitasi pengelolaan perlengkapan dalam hal ini adalah Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya-upaya dan capaian-capaian yang progresif guna mendukung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka mempertahankan status laporan keuangan dan BMN, serta mewujudkan kepatuhan dan ketertiban dalam melakukan pencatatan dan pelaporan BMN nya. Capaian-capaian yang telah dilakukan selama tahun 2020 antara lain :

1) Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi Laporan BMN untuk Tahun Anggaran 2020. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Operator SAIBA dan Operator BMN Wilayah sebanyak 4 orang, Rekon ini dilaksanakan dengan metode koordinasi langsung ke Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Kegiatan menghasilkan data valid dari 14 UPT untuk Rekon Semester II tahun 2020 yang kemudian diolah menjadi Laporan Keuangan Semester II T.A. 2020.

Kegiatan ini menghasilkan output :

- 1) Berita Acara Rekonsiliasi sebanyak 23 Berita Acara (9 DIPA Eselon 1 dan 14 UPT)
- 2) Laporan BMN Tahun Anggaran 2019 Satker Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 9 program (9 laporan),
- 3) Laporan BMN Tahun Anggaran 2019 sejumlah 14 UPT (14 laporan),

2) Telah dilaksanakannya monitoring pengelolaan BMN pada Divisi dan Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara.

Monitoring dilakukan dalam rangka Penertiban BMN dari sisi Pengelolaan BMN (Penatausahaan, Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan dan Penghapusan) yang ada di semua UPT. Dari 14 Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, telah dilakukan monitoring dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3 20 Monitoring Pelaksanaan BMN

No	UPT Yang Dilakukan Monitoring	Waktu Pelaksanaan	Hasil / Isi Pembahasan Monitoring (Output)
1	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	NIHIL	NIHIL
2	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari	03 Juni 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020
3	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau	NIHIL	NIHIL
4	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	NIHIL	NIHIL
5	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari	08 Juni 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020
6	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Unaaha	NIHIL	NIHIL
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka	27 Juli 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020
8	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha	NIHIL	NIHIL
9	Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari	04 Juni 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020

No	UPT Yang Dilakukan Monitoring	Waktu Pelaksanaan	Hasil / Isi Pembahasan Monitoring (Output)
10	Balai Pemasarakatan Kelas II Baubau	NIHIL	NIHIL
11	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari	NIHIL	NIHIL
12	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	NIHIL	NIHIL
13	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	NIHIL	NIHIL
14	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Kendari	05 Juni 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020
15	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari	05 Juni 2020, 09 Juni 2020	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020

Kegiatan monitoring ini menghasilkan output laporan monitoring bidang BMN berupa pengelolaan BMN.

3) Penetapan status pengguna BMN per tanggal 31 Desember 2020 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dan Unit Pelaksana Teknis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 21 Penetapan Status Pengguna BMN

No	Unit Kerja	Penetapan Status Pengguna BMN
1	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	Rp 24.695.075.908
2	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kendari	Rp 30.287.340.157
3	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Baubau	Rp 47.191.695.927
4	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	Rp 16.775.392.961
5	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari	Rp 17.177.569.389
6	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Unaaha	Rp 9.683.507.495
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka	Rp 34.803.469.122



No	Unit Kerja	Penetapan Status Pengguna BMN	
8	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha	Rp	12.476.178.144
9	Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari	Rp	6.485.866.243
10	Balai Pemasarakatan Kelas II Baubau	Rp	3.061.265.529
11	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari	Rp	7.544.010.489
12	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	Rp	5.846.053.770
13	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	Rp	6.939.985.590
14	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Kendari	Rp	589.116.178
15	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari	Rp	471.537.783
TOTAL		Rp	224.028.064.685



h. Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel (LDM)

Tabel 3 22 Jumlah Layanan Ketatausahaan yang Akurat dan Akuntabel

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	1 Layanan	Penilaian dilakukan di akhir tahun	Penilaian dilakukan di akhir tahun	1 Layanan	Penilaian dilakukan di akhir tahun	Penilaian dilakukan di akhir tahun

Analisis:

Target pada tahun sebelumnya dan tahun ini sama 1 layanan dan realisasinya juga sama 100%, realisasi 100% dapat dipertahankan pada tahun ini karena semua kegiatan layanan ketatausahaan terlaksana semua dengan baik.

Capaian indikator kinerja jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara selama tahun 2020 telah terealisasi dengan baik. Capaian layanan ketatausahaan dimaksud antara lain :

Pelayanan administrasi dan persuratan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan bulan Desember 2020 Surat yang keluar dan masuk di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 17.324 dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 3 23 Surat Masuk Keluar

No	Jenis Surat	Jumlah
1	Surat Masuk	5.289
2	Surat Keluar	12.035
TOTAL		17.324

**i. Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/
dipublikasikan kepada masyarakat (LDM)**

*Tabel 3 24 Jumlah Informasi Kegiatan Kantor Wilayah yang Disebarluaskan/
Dipublikasikan kepada Masyarakat*

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan / dipublikasikan kepada masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Analisis:

Target pada tahun sebelumnya dan tahun ini sama 1 layanan dan realisasinya juga sama 100%, realisasi 100% dapat dipertahankan pada tahun ini karena semua kegiatan layanan kehumasan terlaksana semua dengan baik.

Tabel 3 25 Data Jumlah berita tahun 2020

Platform	Jumlah Berita
Website	381

Tingginya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan derasnya arus informasi ke masyarakat, menyebabkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara harus mengedepankan aspek citra dan reputasi kinerja yang baik melalui kegiatan atau upaya-upaya kehumasan. Penyampaian informasi dan komunikasi saat ini tidak lagi bersifat lokal, akan tetapi sudah bersifat nasional bahkan internasional.

Kondisi tersebut diatas menuntut Subbagian Penyusunan Pelaporan, Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi yang mempunyai peran sebagai Humas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan peran dan fungsi serta kualitas kehumasannya.

Oleh karena itu, Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara khususnya Subbagian Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi Informasi telah melakukan Aktivitas guna memperoleh capaian-capaian berdasarkan indikator kinerja peningkatan kualitas dan kuantitas fungsi kehumasan dengan capaian pada beberapa bidang, antara lain sebagai berikut.

a. Bidang Kehumasan

1) Pengelolaan Website Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara mempunyai website yang selalu dimutakhirkan setiap ada pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah agar masyarakat tahu kegiatan-kegiatan Kanwil yang sudah dilaksanakan sehingga penyampaian informasi sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah tercapai. Alamat website Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara dapat diakses pada laman internet **sultra.kemenkumham.go.id** Konten-konten yang dimutakhirkan pada website Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara seperti Berita Kanwil Terkini, Berita UPT, Berita Hukum dan HAM, foto kegiatan, video kegiatan, data profil pejabat Kanwil dan Ka UPT, Data dan Informasi, Pelayanan Publik, Karya WBP, Produk Hukum, Banner-banner, dan lain-lain, Karya WBP, Produk Hukum, Banner-banner, dan lain-lain.

Namun sebagai konten utama yang paling sering di mutakhirkan adalah konten pada Berita Kanwil Terkini, Berita UPT dan Berita Hukum dan HAM sebagai sarana dalam menyampaikan kegiatan-kegiatan pada Kantor Wilayah dan UPT Sulawesi Tenggara. Hasil dari aktivitas ini adalah terpublikasinya kegiatan-kegiatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara kepada masyarakat melalui website.

2) Pengelolaan media social instagram, facebook dan twitter.

Masyarakat Indonesia sekarang ini sudah mulai fasih memberdayakan teknologi informasi. Masyarakat menggunakan media sosial untuk berbagai aktivitas seperti bisnis online, publikasi kegiatan, menyampaikan gagasan, ataupun sekedar bertegur sapa dengan teman dan saudara.

Kecenderungan masyarakat yang dulu lebih senang berlama-lama membaca koran cetak, sekarang ini sudah cukup puas dengan membaca berita di media sosial seperti twitter maupun facebook.

Semakin tak terpisahkannya masyarakat Indonesia dengan media sosial, telah dimanfaatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara untuk membuat jejaring media sosial. Media sosial yang dikelola, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3 26 Data Humas Link Media Sosial

NO	UPT	LINK MEDIA SOSIAL				
		FACEBOOK	INSTAGRAM	TWITTER	YOUTUBE	LAIN-LAIN
1	KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA	https://www.facebook.com/kanwil.kemenuhamsultra.5	https://instagram.com/kanwil.kemenuhamsultra?igshid=f4cqvh66qwz	https://twitter.com/Kumham_Sultra?s=08	https://www.youtube.com/channel/UC9C-hxbr59hvbwokNW3yUeA	https://sultra.kemenuham.go.id/
2	RUTAN KELAS IIB KOLAKA	https://www.facebook.com/rutan.kolaka.12	https://www.instagram.com/rutan.kolaka/	https://twitter.com/Rutanlib	https://www.youtube.com/channel/UCtKpiwXhz-xa-4Wa2SMOWQ	-
3	LPP KELAS III KENDARI	https://www.facebook.com/LPP.Kendari/	https://www.instagram.com/lapasperempuan_kendari/?hl=id	-	https://www.youtube.com/channel/UCFianuko08ve12O7EoLW4nLQ	-
4	KANIM KELAS I TPI KENDARI	https://www.facebook.com/kanorimigrasikendari	https://www.instagram.com/imigrasikendari	https://twitter.com/imigrasikendari	https://www.youtube.com/channel/UCLRcqVynkJXoYudzGVuj6xw	https://kendari.imigrasi.go.id
5		-		-		



NO	UPT	LINK MEDIA SOSIAL				
		FACEBOOK	INSTAGRAM	TWITTER	YOUTUBE	LAIN-LAIN
	BAPAS KELAS II BAUBAU		https://www.instagram.com/bapas_baubau		https://www.youtube.com/watch?v=OQ9J7fKw0XE	
6	LPKA KELAS II KENDARI	https://www.facebook.com/LPKA-Kendari-1339125729487061/	https://www.instagram.com/lpkakendari/?hl=id	https://twitter.com/LpkaK?lang=en	https://www.youtube.com/channel/UCuqR_w7bkhMU5PGGqXu7fQQ?view_as=subscriber	-
7	LAPAS KELAS IIA KENDARI	https://www.facebook.com/lapaskendarisultara	https://www.instagram.com/lapaskendarisultara	https://twitter.com/lapaskendarisultara	-	-
8	BAPAS KELAS II KENDARI	https://www.facebook.com/balai.pemasyarakatatan.148	https://www.instagram.com/bapaskendari_media45/	https://twitter.com/bapaskendari	-	-
9	LAPAS KELAS IIA BAUBAU	https://www.facebook.com/Lembaga-Pemasyarakatatan-Klas-IIA-Bau-Bau-156900354468580/	https://www.instagram.com/lapas_kelas2a_baubau	https://twitter.com/LapasBaubau	https://www.youtube.com/user/mayarainbow2000	-
10	RUTAN KELAS IIB UNAAHA	-	https://www.instagram.com	-	-	70 Liliana Naha.



NO	UPT	LINK MEDIA SOSIAL				
		FACEBOOK	INSTAGRAM	TWITTER	YOUTUBE	LAIN-LAIN
			om/rutan_unaahasultra/?hl=id			blogspot.com
11	KANIM KELAS III NON TPI BAUBAU	https://www.facebook.com/kanim03.baubau	https://www.instagram.com/imigrasi_baubau	https://twitter.com/imigrasibaubau	https://www.youtube.com/watch?v=uYsc_a_aTkg	-
12	KANIM KELAS III NON TPI WAKATOBI	https://www.facebook.com/kanimwakatobi/?ref=bookmarks	https://www.instagram.com/imigrasiwakatobi/?hl=id	https://twitter.com/kanimwakatobi	-	http://wakatobi.imigrasi.go.id/index.php/id/

Hasil output dari aktivitas ini adalah terpublikasinya kegiatan-kegiatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara lebih meluas lagi melalui media sosial.

3) Terlaksananya peliputan kegiatan Kantor Wilayah dan UPT Sulawesi Tenggara.

Salah satu tugas dan fungsi Subbagian Penyusunan Pelaporan, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi yaitu peliputan kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Secara prosedur, alur proses peliputan sampai kepada penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dijelaskan dibawah ini :

- Meliput, mengumpulkan, menghimpun serta mendokumentasikan data dan informasi kegiatan,
- Membuat dan mengolah pers release sebagai bahan media,
- Menyampaikan data dan informasi kegiatan melalui Website, Media Sosial, ataupun melalui bulletin, brosur, leaflet, dan lain-lainnya.

Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat meliput dan mendokumentasikan semua kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun oleh Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sehingga dengan hasil liputan maupun dokumentasi dapat dipublikasikan melalui media yang ada dan dapat diakses semua masyarakat.

Output dari aktivitas ini adalah terlaksananya dan terdokumentasinya kegiatan-kegiatan peliputan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

4) Telah dilaksanakannya penanganan pengaduan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 36 dan 37 mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik (institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik) wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik.

Melaksanakan amanat tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara telah menyediakan sarana pengaduan antara lain:

- Dapat melalui alamat web lapor.go.id,
- Dapat melalui alamat web sultra.kemenkumham.go.id/hubungi-kami,
- Dapat melalui E-Mail ppl_sultra@yahoo.go.id

5) Penyelenggaraan Humas melalui pembuatan spanduk, banner, poster, baliho, brosur, dan lain-lain.

Kegiatan ini berupa pencetakan spanduk, banner, poster, brosur, baliho, majalah dan sejenisnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak, memperkenalkan atau menginformasikan kepada masyarakat tentang himbauan, atau program-program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara.

6) Terlaksananya kerjasama informasi dengan media massa.

Aktivitas ini bertujuan meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara melalui kerjasama dengan media massa baik

cetak maupun elektronik dengan mengangkat issue actual sesuai dengan tujuan yang telah digariskan berdasarkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Peningkatan kegiatan publikasi guna penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan cara mengundang teman-teman dari media massa (wartawan) untuk diliput dan dipublikasikan beritanya melalui media massanya masing-masing sehingga informasi-informasi kegiatan dapat tersebar luas kepada masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara juga mengundang para wartawan untuk melakukan jumpa pers (press conference) dalam rangka penyampaian informasi penting bagi masyarakat.

7) Terlaksananya kegiatan Keprotokolan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Pelayanan Keprotokolan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang memenuhi standar sehingga menghasilkan kegiatan acara pimpinan secara tertib sesuai dengan protap keprotokolan yang berlaku. Kegiatan keprotokolan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara antara lain :

- ✓ fasilitasi penerimaan kunjungan kerja,
- ✓ fasilitasi penyelenggaraan upacara,
- ✓ fasilitasi penyelenggaraan acara ceremonial.

8) Terlaksananya kerjasama / Koordinasi antar instansi.

Kegiatan ini berupa pelaksanaan koordinasi antar instansi baik secara vertikal maupun horizontal, baik koordinasi dengan instansi internal maupun eksternal. Kantor Wilayah telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi.

j. Jumlah layanan perkantoran (LDM)

Tabel 3 27 Jumlah layanan perkantoran

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Analisis:

Target pada tahun sebelumnya dan tahun ini masih sama 1 layanan, realisasi tahun lalu dan tahun ini sama 1 layanan sehingga capaiannya juga sama 100%, capaian dapat bertahan 100% karena kegiatan layanan perkantoran berjalan dengan baik.

a. Telah dibayarkannya gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu.

Pegawai pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sejumlah 138 orang. Total belanja gaji dan tunjangan kinerja yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 9.064.404.147,-

b. Telah terselenggaranya belanja operasional dan pemeliharaan kantor

Tabel 3 28 Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor

No	Kegiatan	Nilai (Rp.)	Penyerapan (Rp.)	%
1	Kesehatan Pegawai	5.000.000	5.000.000	100
2	Pakaian Dinas Pegawai	137.300.000	137.077.000	100
3	Pemeliharaan Gedung	92.795.000	92.768.083	100
4	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	57.000.000	55.840.909	98
5	Pemeliharaan Kendaraan	440.798.000	440.415.689	100
6	Langganan daya dan jasa	226.000.000	216.408.288	96
7	Keperluan Perkantoran	891.712.000	891.704.305	100



No	Kegiatan	Nilai (Rp.)	Penyerapan (Rp.)	%
8	Konsultasi dan Koordinasi	259.280.000	259.068.296	100
9	Pelantikan/ Sumpah Jabatan	33.200.000	33.178.000	100
10	Jamuan Tamu Pimpinan	100.000.000	99.815.147	100
11	Honor Operasional Satker	168.120.000	167.220.000	99
12	Sewa Operasional Perkantoran	616.686.000	616.677.600	100
13	Penanganan dan Pencegahan Covid-19	10.000.000	10.000.000	100
TOTAL		3.037.891.000	3.025.173.317	100



2. CAPAIAN KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN

a. Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian (W.06.1.a)

Tabel 3 29 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Meningkatnya layanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	7,3	7,03	96,35%

Analisis:

Pada tahun lalu tidak ada target ini. Realisasi kinerja tahun ini sebesar 7,03% sehingga capaiannya 96,35%. Capaian tersebut didapatkan dari rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat yang ada di UPT Keimigrasian.

Tabel 3 30 Data IKM satuan kerja Keimigrasian

No	Satuan Kerja	Nilai IKM
1	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	7,1
2	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	7,0
3	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	7,0
	Rata-rata	7,03

b. Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian (W.06.2.b)

Tabel 3 31 Persentase penurunan pelanggaran kemigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Persentase penurunan pelanggaran kemigrasian	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	2%	51,2%	2.560%

Analisis:

Pada tahun lalu tidak ada target ini. Realisasi kinerja tahun ini sebesar 51,2% sehingga capaiannya 2.560%. Capaian tersebut didapatkan dari rata-rata perhitungan penurunan pelanggaran yang ada di UPT Keimigrasian.

Tabel 3 32 Persentase penurunan pelanggaran kemigrasian

No	Satuan Kerja	Pelanggaran tahun 2019	Pelanggaran tahun 2020	Persentase penurunan pelanggaran
1	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	30	15	50%
2	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	12	5	58%
3	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	1	1	0
	Total	43	21	51,2%

*Rumus Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian =

$[(\text{Jumlah pelanggaran keimigrasian tahun lalu} - \text{Jumlah pelanggaran keimigrasian tahun ini}) \times \text{jumlah pelanggaran keimigrasian tahun lalu} \times 100\%]$

c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan fungsi Keimigrasian (LDM)

Tabel 3 33 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan fungsi Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$
Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan fungsi Keimigrasian	Tidak ada target ini di tahun lalu	Tidak ada target ini di tahun lalu	Tidak ada target ini di tahun lalu	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%

Analisis:

Pada tahun lalu tidak ada target ini. Realisasi kinerja tahun ini sebesar 9 Kegiatan sehingga capaiannya 100%. Capaian tersebut didapatkan dari rata-rata perhitungan penurunan pelanggaran yang ada di UPT Keimigrasian.

Tabel 3 34 Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan fungsi Keimigrasian

No.	Tempat	Hasil Kegiatan	Keterangan
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pasport Simpatik dilaksanakan setiap Bulan sekali berupa layanan Easy pasport . Penggunaan Laporan Harian Intelijen Percepatan Realisasi anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Pembinaan Inteldakim Tanggal 05 Februari 2020 Kegiatan Pembinaan Lantaskim Tanggal 24 Juni 2020 Pembinaan Fasilitatif Tanggal 30 Juni 2020
2.	Kantor Imigrasi Kelas III Baubau	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pasport Simpatik dilaksanakan setiap Bulan sekali. Penggunaan Laporan Harian Intelijen Pengoptimalan Realisasi Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Pembinaan Inteldakim Tanggal 11 s/d 13 Februari 2020 Kegiatan Pembinaan Lantaskim Tanggal 20 s/d 22 Desember 2020 Pembinaan Fasilitatif Tanggal 20 sd 22 Desember 2020
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pasport Simpatik dilaksanakan setiap Bulan sekali. Penggunaan Laporan Harian Intelijen Percepatan Realisasi anggaran dalam hal pengadaan barang 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Pembinaan Inteldakim Tanggal 11 s/d 13 Februari 2020 Kegiatan Pembinaan Lantaskim Tanggal 05 sd 07 Agustus 2020 Pembinaan Fasilitatif Tanggal 21 s/d 23 Juni 2020

Tabel 3 35 Pelayanan paspor

Satker	Paspor 24 Halaman			Paspor 48 Halaman		
	2019	2020	% Naik/ Turun	2019	2020	% Naik/ Turun
Kanim Kelas I TPI Kendari	75	20	-275,0	9.681	3.812	-154,0
Kanim Kelas III Non TPI Baubau	10	24	58,3	2.301	7.463	69,2
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi	2	0	0	390	498	21,7
Jumlah	87	44	-97,7	12.372	11.773	-5,1

Tabel 3 36 Pelayanan Kitas

Satuan Kerja	Kitas Baru			Perpanjangan Kitas		
	2019	2020	% Naik/ Turun	2019	2020	% Naik/ Turun
Kanim Kelas I TPI Kendari	711	256	-177,7	80	62	-29,0
Kanim Kelas III Non TPI Baubau	47	9	-422,2	1	7	85,7
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi	0	0	0	24	11	-118,2
Jumlah	758	265	-186,0	105	80	-31,3

Tabel 3 37 Pelayanan ITK

Satuan Kerja	Perpanjangan ITK		
	2019	2020	Naik/ Turun
Kanim Kelas I TPI Kendari	24.237	33.954	28,6
Kanim Kelas III Non TPI Baubau	183	101	-81,2
Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi	120	46	-160,9
Jumlah	24.540	34.101	28,0

Tabel 3 38 Pengawasan WNA

NO	UNIT/ SATKER	TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI				KETERANGAN
		MASUK		KELUAR		
		WNI	WNA	WNI	WNA	
1	Kanim Kelas I TPI Kendari	654	9.308	322	4.868	Crew Kapal
		369	3.283	99	2.101	Crew Kapal
2	Kanim Kelas III Non TPI Baubau	72	465	67	489	Crew Kapal
		212	27	357	57	Crew Kapal
3	Kanim Kelas III Non TPI Wakatobi	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
TOTAL		1.307	13.083	845	7.515	

d. Penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian (W.06.2.a)

Tabel 3 39 Penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah	Penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian	Tidak ada target ini di tahun lalu	Tidak ada target ini di tahun lalu	Tidak ada target ini di tahun lalu	12 LHK	8	67%

Analisis:

Tidak terdapat target indikator kinerja diatas pada tahun lalu sehingga tidak dapat diperbandingkan target dan capaiannya. Pada tahun ini realisasi kinerja sebesar 8 kegiatan hal ini dikarenakan adanya larangan dan himbauan agar tidak melakukan kegiatan dalam rangka mencegah penyebaran wabah covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan adanya Realokasi anggaran untuk pencegahan Penyebaran Wabah covid 19 maka beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

1. Penyelidikan intelijen keimigrasian

No	Kegiatan Penyelidikan intelijen keimigrasian	Waktu	Keterangan
1	Kegiatan Penyelidikan WNA yang bekerja di Kec. Nambo Kendari	26 s/d 28 Feb 2020	Terdapat pembatalan Izin Tinggal dan akan dilakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Deportasi terhadap 4 Org TKA An. Li Huamin, Hao zhijun, An Jianli dan Li Guifu (WN Tiongkok)
2.	Kegiatan penyelidikan WNA pada Bandara HO Kendari	22 s/d 24 Juni 2020	Adanya Beberapa titik Demonstrasi di beberapa tempat sehubungan dengan Rencana Kedatangan TKA WN Tiongkok.
3.	Kegiatan Penyelidikan WNA pada Bandara HO Kendari	29 Juni s/d 01 Juli 2020	Adanya Beberapa titik Demonstrasi di beberapa

No	Kegiatan Penyelidikan intelijen keimigrasian	Waktu	Keterangan
			tempat sehubungan dengan Rencana Kedatangan TKA WN Tiongkok.
4.	Kegiatan Penyelidikan WNA pada Bandara HO Kendari	06 s/d 08 Juli 2020	Adanya Beberapa titik Demonstrasi di beberapa tempat sehubungan dengan Rencana Kedatangan TKA WN Tiongkok.
5.	Kegiatan Penyelidikan WNA pada Bandara HO Kendari	14 Juli 2020	Adanya Beberapa titik Demonstrasi di beberapa tempat sehubungan dengan Rencana Kedatangan TKA WN Tiongkok.
6.	Kegiatan Penyelidikan Di Kecamatan Tomia Kab. Wakatobi	26 s/d 29 Agustus 2020	Adanya dugaan 1 (satu) Orang WNA yang telah melampaui Batas izin tinggal
7.	Rapat TIM Pora Provinsi Sulawesi Tenggara	06 Oktober 2020	Membahas tentang SOP Pelayanan dan pengawasan Tenaga kerja asing
8.	Kegiatan Operasi Mandiri Di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara	10 s/d 13 November 2020	Terdapat dugaan Warga Negara Asing yang telah menyalah gunakan Izin Tinggalnya Kunjungan

Tabel 3 40 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Tindakan Administratif	Tahun 2020												Total/ Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pendeportasian			1				1						2 Keg
Pendetensian													0 Keg

3. CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

a. Persentase Peningkatan PNBP AHU di Wilayah (W.03.1.a)

Tabel 3 41 Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	$5 = \frac{5}{4/3 \times 100\%}$	6	7	8
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Indikator tidak ada di tahun lalu	Indikator tidak ada di tahun lalu	Indikator tidak ada di tahun lalu	5%	-33,21%	-664%

Analisis:

Tidak terdapat target indikator kinerja diatas pada tahun lalu sehingga tidak dapat diperbandingkan target dan capaiannya. Pada tahun ini targetnya sebesar 5% terealisasi sebesar -33,21% sehingga capaiannya sebesar -33,21%. PNBP pada tahun 2020 mengalami tidak dapat mencapai target dikarenakan terkendala pandemi covid-19

Tabel 3 42 Data PNBP AHU

No	Asal PNBP	Jumlah PNBP 2019	Jumlah PNBP 2020	Naik/Turun	%
1	Fidusia Pendaftaran	6.626.350.000	4.408.000.000	- 2.218.350.000	-33,48
2	Fidusia Perubahan	5.500.000	4.500.000	-1.000.000	-18,18
3	Kenotariatan	5.000.000	20.000.000	15.000.000	300,00
	Jumlah	6.636.850.000	4.432.500.000	- 2.204.350.000	-33,21

b. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dengan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah (W.03.1.b)

Tabel 3 43 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	Indikator tidak ada di tahun lalu	Indikator tidak ada di tahun lalu	Indikator tidak ada di tahun lalu	80%	100%	125%

Analisis:

Pada tahun 2019 tidak ada indikator ini sedangkan target pada tahun 2020 sebesar 80% dengan capaian 3 dari 3 (100%) pengaduan yang terselesaikan. Seluruh pengaduan terselesaikan karena pengaduan yang masuk telah cepat ditindaklanjuti.

1) Data laporan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris

Tabel 3 44 Data laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris tahun 2020

NO	Nama Notaris	Tempat Kedudukan	No SK	Jenis Pelanggaran	Jenis Hukuman
1	Jorinda Bittikaka, SH., M.Kn	Kab. Konawe Selatan	AHU.9.AH.02.04 Tahun 2020 tanggal 13-07-2020	Pasal 7, Pasal 16, dan Pasal 17 UUJN, Pasal 15 ayat (3) Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10/2004	Pemberhentian sementara selama 3 bulan
2	Muhammad Hasyim, SH., M.Kn.	Kota Kendari	AHU.24.AH.02.04 Tahun 2020 tanggal 15-09-2020	Pasal 17 UUJN	Pemberhentian sementara selama 3 bulan
3	Irsan Haeruddin Akif, SH., M.Kn.	Kab. Kolaka Timur	AHU.24.AH.02.04 Tahun 2020 tanggal 15-09-2020	Pasal 17 UUJN	Pemberhentian sementara selama 3 bulan

Program : Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

a. Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui Kantor Wilayah (W.07.1.a)

Tabel 3 45 Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Terselenggara pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui Kantor Wilayah	80%	80% (8 Permohonan)	100%	10 Permohonan	32 Permohonan	320%

Analisis:

Target tahun lalu sebesar 80% dan terealisasi 80% (8 permohonan) sehingga capaian pada tahun lalu sebesar 100% sedangkan target pada tahun ini sebesar 10 permohonan dan realisasi sebesar 32 permohonan sehingga capaiannya sebesar $32/10 \times 100 = 320\%$. capaian pada tahun ini mengalami kenaikan daripada tahun lalu hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya sosialisasi/desiminasi yang diberikan kepada stakeholder di wilayah.

a) Pelayanan HKI di Daerah

Tabel 3 46 Pelayanan HKI di daerah

No	Jenis	Jumlah Permohonan	PNBP (Rp)
1	Hak Cipta	27	8.600.000
2	Hak Merk	3	4.100.000
3	Hak Paten	2	2.050.000
4	Desain Industri	0	0
5	Indikasi Geografis	0	0
	TOTAL	32	14.750.000



Tabel 3 47 Tabel Jenis Produk Layanan HKI

PRODUK HKI																	
HAK CIPTA									MEREK		PATEN		DESAIN INDUSTRI		INDIKASI GEOGRAFIS		TOTAL
PENDIDIKAN	HUKUM	PERAIRAN	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	KESEHATAN	SENI DAN OLAAHRAGA	PENDIDIKAN	TEKNOLOGI	JUMLAH	NAMA MERK	JUMLAH	HERBAL	JUMLAH	JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH	
11	5	2	3	3	1	10	2	27	3	3	2	2	0	0	0	0	30



b. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah (W.07.1.b)

Tabel 3 48 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	80%	80% (Telah dilaksanakan di Aula Wonua Monapa)	100%	30 Stakeholder	450 stakeholder	1500%

Analisis:

Target tahun lalu sebesar 80% dan terealisasi 80% sehingga capaiannya sebesar 100% sedangkan target pada tahun ini sebesar 30 Stakeholder dan realisasinya sebesar 450 stakeholder sehingga capaiannya sebesar 1500%. capaian pada tahun ini mengalami kenaikan daripada tahun lalu hal ini disebabkan oleh kegiatan yang dilaksanakan secara daring akibat kebijakan dari penanganan pandemi Covid-19, dimana kegiatan daring ini menyebabkan setiap orang dimanapun dapat mengakses kegiatan ini.

Tabel 3 49 Kegiatan Diseminasi dan Promosi KI

No	Materi	Peserta	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1	Webinar Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Desain Industri	50	Kendari Fakultas Hukum UHO	2 Juni 2020
2	Webinar Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Desain Industri	50	Kendari Fakultas Hukum Unsultra	2 Juni 2020
3	Webinar Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Desain Industri	50	Kendari Fakultas Pertanian Unsultra	2 Juni 2020



No	Materi	Peserta	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
4	Webinar Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Desain Industri	50	Kendari Fakultas Hukum UMK	3 Juni 2020
5	Webinar Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Desain Industri	50	Kendari FEBI UMK	3 Juni 2020
6	Webinar Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Desain Industri	50	Kendari Fakultas Hukum USN Kolaka	3 Juni 2020
7	Webinar Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Desain Industri	50	Kendari STIE 66	4 Juni 2020
8	Webinar Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Desain Industri	50	Kendari Fakultas Hukum Unismuh Buton	4 Juni 2020
9	Webinar Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Desain Industri	50	Kendari Fakultas Hukum Unilaki	4 Juni 2020
Jumlah		450 Stakeholder		



c. Jumlah Pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (W.07.1.c)

Tabel 3 50 Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	Indikator tidak ada di tahun lalu	Indikator tidak ada di tahun lalu	Indikator tidak ada di tahun lalu	2 Locus	1	50%

Analisis:

Pada tahun lalu tidak terdapat indikator ini sehingga tidak dapat diperbandingkan. Target pada tahun ini sebesar 2 Locus dan realisasinya sebesar 50% sehingga capaiannya sebesar 50%. capaian ini diperoleh melalui kegiatan Koordinasi dan Desiminasi Pencegahan Pelanggaran KI.

Tabel 3 51 Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI

No	Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI	Waktu dan Tempat
1	Koordinasi dan Desiminasi Pencegahan Pelanggaran KI	Wonua Monapa Hotel, 18 Juni 2020

Program : Program Pembentukan Produk Hukum Daerah

a. Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi (W.08.1)

Tabel 3 52 Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	80%	80%	100%	20 Raperda	34 Raperda	170%

Analisis:

Target tahun lalu sebesar 80% dan terealisasi 80% sehingga capaiannya 100% sedangkan target pada tahun ini sebesar 20 Raperda dan terealisasi sebesar 34 Raperda sehingga capaiannya sebesar 170%. capaian pada tahun ini mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Instansi Terkait baik secara langsung maupun melalui surat dalam kegiatan rancangan produk hukum dan juga lebih banyak raperda yang diajukan.

Tabel 3 53 Melakukan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah

No	Nama Daerah	Waktu Pelaksanaan	Hasil Kegiatan	Ket
1	Kabupaten Muna	Bulan Maret	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tidak diharmonisasi karena hanya melampirkan surat permohonan harmonisasi dan draft Raperda sehingga dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk dilengkapi sesuai Syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-O1.PP.04.02 Tahun 2019

No	Nama Daerah	Waktu Pelaksanaan	Hasil Kegiatan	Ket
2	Kabupaten Konawe Kepulauan	Bulan Juli	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan	Telah diharmonisasi melalui Rapat secara virtual dikarenakan dilaksanakan dalam Masa Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan sistem kerja WFH/WFO
3	Kabupaten Buton Utara	Bulan Juli	<p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Cagar Budaya</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Kabupaten Buton Utara Pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanahan</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Atas Perda Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan</p>	Tidak diharmonisasi karena hanya melampirkan surat permohonan harmonisasi dan draft Raperda sehingga dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk dilengkapi sesuai Syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-O1.PP.04.02 Tahun 2019
4	Kabupaten Muna Barat	Bulan Juli	<p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tempat Pelelangan</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Kota Terpadu Mandiri</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna Barat</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan/</p>	Tidak diharmonisasi karena hanya melampirkan surat permohonan harmonisasi dan draft Raperda sehingga dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk dilengkapi sesuai Syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-O1.PP.04.02 Tahun 2019



No	Nama Daerah	Waktu Pelaksanaan	Hasil Kegiatan	Ket
			Penyesuaian Nama-Nama Desa dan Kecamatan	
			Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender	
			Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan	
5	Provinsi Sulawesi Tenggara	Bulan Agustus – September	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah	Merupakan Inisiatif DPRD sehingga pengharmonisasian dikoordinasikan oleh Bapemperda. Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara hanya menjadi peserta rapat dalam pembahasan Raperda dimaksud
			Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi	
			Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil	
			Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perizinan Usaha Budidaya	
			Perikanan Laut	
			Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	
6	Kabupaten Bombana	Bulan Agustus – Bulan November	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moico	Tidak diharmonisasi karena hanya melampirkan surat permohonan harmonisasi dan draft Raperda sehingga dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk dilengkapi sesuai Syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-O1.PP.04.02 Tahun 2019
			Rancangan Peraturan Daerah Tentang Garis Sempadan	
7	Kabupaten Buton	Bulan Oktober	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Tidak diharmonisasi karena hanya melampirkan surat permohonan harmonisasi dan draft Raperda sehingga dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk dilengkapi sesuai Syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-O1.PP.04.02 Tahun 2019



No	Nama Daerah	Waktu Pelaksanaan	Hasil Kegiatan	Ket
				Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yakni: a) Naskah akademik/ Penjelasan dan atau Keterangan; b) Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah; c) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarperangkat Daerah; dan d) Izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah
8	Kota Kendari	Bulan November	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan 1 CBD Teluk Kendari Tahun 2020-2040	Telah diharmonisasi
9	Kabupaten Wakatobi	Bulan November	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Wakatobi Tahun 2020-2040	Telah diharmonisasi
Jumlah Total			34 Raperda	

Tabel 3 54 Memberikan Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik

NO	FASILITASI NASKAH AKADEMIK		
	JUMLAH KAB/ KOTA	JUMLAH PENYUSUN NASKAH	JUMLAH KEGIATAN
1	Kabupaten Bombana	8 Orang	1 Kegiatan Fasilitas Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perusahaan Air Minum

b. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan (W.08.2)

Tabel 3 55 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	20 Orang	20 Orang	100%	17 Orang	17	105%

Analisis:

Target tahun lalu sebesar 20 Orang dan terealisasi 20 Orang sehingga capaiannya sebesar 100% sedangkan target pada tahun ini sebesar 17 Orang dan realisasi sebesar 17 Orang sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian pada tahun ini dapat dipertahankan 100% hal ini dikarenakan kegiatan capat berjalan dengan baik.

Tabel 3 56 Kegiatan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

NO	MATERI	JUMLAH PESERTA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
1	Jenjang Karir Perancang Peraturan Perundang-Undangan	17	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM secara Virtual	Juni 2020

Program : Program Pemajuan Hak Asasi Manusia

a. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM (W.09.1.a)

Tabel 3 57 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Pemerintah Daerah	17 Kabupaten /Kota	425%	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	100%

Analisis:

Target tahun lalu sebesar 4 Pemerintah Daerah dan terealisasi 15 Kabupaten / Kota sehingga capaiannya sebesar 375% sedangkan target pada tahun ini sebesar 2 Instansi Pemerintah dan realisasinya sebesar 2 instansi pemerintah sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian pada tahun ini mengalami penurunan namun masih tercapai 100% dikarenakan oleh kesadaran instansi pemerintah daerah terkait aksi HAM.

Tabel 3 58 Kegiatan program aksi HAM

No	Nama Kegiatan	Materi	Peserta	Moderator/Narasumber	Waktu/ Tempat Pelaksanaan
1	Rapat koordinasi aksi HAM	Penyusunan laporan capaian	50 orang	-Kabag Hukum Bappeda Prov. Sultra - Kakanwil Kemenkumham Sultra	25 juni 2020 di Hotel Dblitz
2	Rapat evaluasi aksi HAM	Pengumpulan data dukung dna evaluasi data dukung	50 orang	-Kabag Hukum Bappeda Prov. Sultra -Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Sultra	10 Agustus 2020 di Hotel Dblitz

b. Jumlah Kabupaten / Kota Peduli HAM (W.09.1.b)

Tabel 3 59 Jumlah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berspektif HAM	Jumlah Kabupaten/ Kota Peduli HAM	3 Pemerintah Daerah	9 Pemerintah Daerah	300%	1 Kabupaten / Kota	14 Kab/Kota	1400%

Analisis:

Target tahun lalu sebesar 3 Pemerintah Daerah dan realisasinya 9 Pemerintah daerah sehingga capaiannya 300%. Sedangkan target pada tahun ini sebesar 1 Kabupaten / Kota dan realisasinya sebesar 14 kab/Kota sehingga capaiannya sebesar 1400%. capaian pada tahun ini mengalami kenaikan daripada tahun lalu hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran Pemerintah Daerah tentang Kab/Kota Peduli HAM

Tabel 3 60 Kabupaten Kota Peduli HAM

No	Kegiatan	Kabupaten / Kota	Waktu
1	Rapat Koordinasi KKP HAM	14 Kab/Kota	24 Juni 2020
2	Rapat Evaluasi KKP HAM	14 Kab/Kota	11 Agustus 2020

c. Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM (W.09.1.c)

Tabel 3 61 Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berspektif HAM	Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Indikator tidak ada di tahun lalu	Indikator tidak ada di tahun lalu	Indikator tidak ada di tahun lalu	1 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	400%

Analisis:

Pada tahun lalu tidak ada indikator ini sehingga tidak dapat diperbandingkan sedangkan target pada tahun ini sebesar 1 Instansi Pemerintah dan realisasinya sebesar 4 Instansi Pemerintah sehingga capaiannya sebesar 400%.

Tabel 3 62 Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

No	Kabupaten / Kota	Penerapan pelayanan publik berbasis HAM
1	Kanim Kendari	Lengkapnya fasilitas disabilitas , ruang tunggu menyusui, area bermain anak dan sejumlah indikator pelayanan publik berbasis HAM
2	Kanim Baubau	
3	Rutan Kolaka	
4	Bapas Baubau	

d. Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah (W.09.2)

Tabel 3 63 Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100\%$
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Indikator tidak ada di tahun lalu	Indikator tidak ada di tahun lalu	Indikator tidak ada di tahun lalu	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133%

Analisis:

Pada tahun lalu tidak ada indikator ini sehingga tidak dapat diperbandingkan sedangkan target pada tahun ini sebesar 3 Rekomendasi dan realisasinya sebesar 4 rekomendasi sehingga capaiannya sebesar 133%. Hasil ini tercapai dari pelayanan rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM yang telah dilakukan kepada 4 (empat) stakeholder berikut:

No	Nama Pemohon	Jenis Rekomendasi	Waktu
1	Susilawati	Mendapatkan perlindungan hukum	16 November 2020
2	Rani Hindayasih	Mendapatkan perlindungan hukum	16 November 2020
3	Saleng bin Rezza	Mendapatkan kejelasan status tanah pada badan pertanahan	17 Juli 2020
4	Dedi Hendarto dan Abdullah Sayuti	Pembicaraan secara kekeluargaan dengan pihak sekolah	25 Agustus 2020

Kasus Dikomunikasikan	Kasus Tidak Dikomunikasikan	Kasus Tembusan Dirjen HAM	Jumlah Kasus
4	0	1	5

Program : Program Pembinaan Hukum Nasional

a. Jumlah orang / kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi (W.10.1.a)

Tabel 3 64 Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan Hukum litigasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Terwujudnya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan Hukum litigasi	424 Kasus	429 Kasus	101%	138 Orang	371 Orang	268.8%

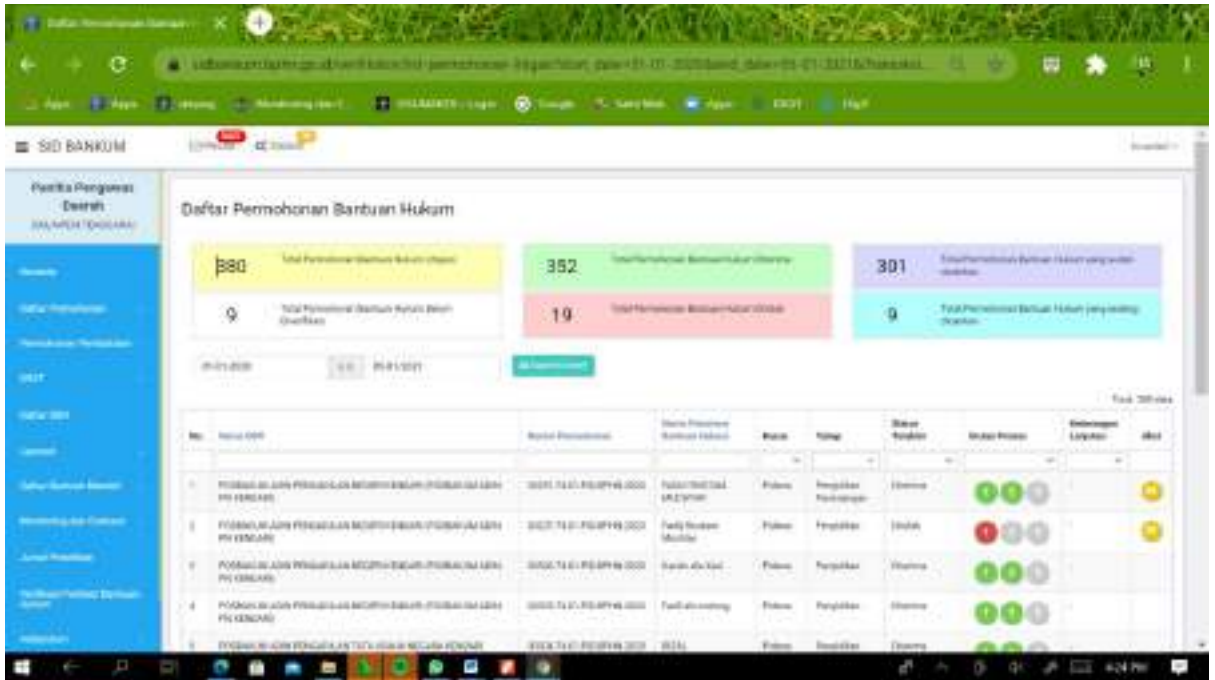
Analisis:

Target pada tahun lalu 424 kasus dan realisasinya 429 kasus sehingga capaiannya masih 101% . Sedangkan target pada tahun ini 138 orang dengan realisasi sebesar 371 Orang sehingga capaiannya 268.8%. Jika diperbandingkan capaian pada tahun ini mengalami kenaikan karena tercapai melebihi 100%, namun jika dibandingkan dengan tahun lalu permintaan bantuan hukum lebih banyak.

Tabel 3 65 Rekap Bantuan Hukum Litigasi

Jumlah penerima bantuan hukum litigasi												Jumlah
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
0	0	0	32	48	17	0	0	0	56	74	144	371

Karena Penandatanganan kontrak Bantuan Hukum dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020 sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak Bantuan Hukum antara Kantor Wilayah dengan Direktur Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di Sulawesi Tenggara.



b. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang / kelompok masyarakat miskin (W.10.1.b)

Tabel 3 66 Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang / kelompok masyarakat miskin

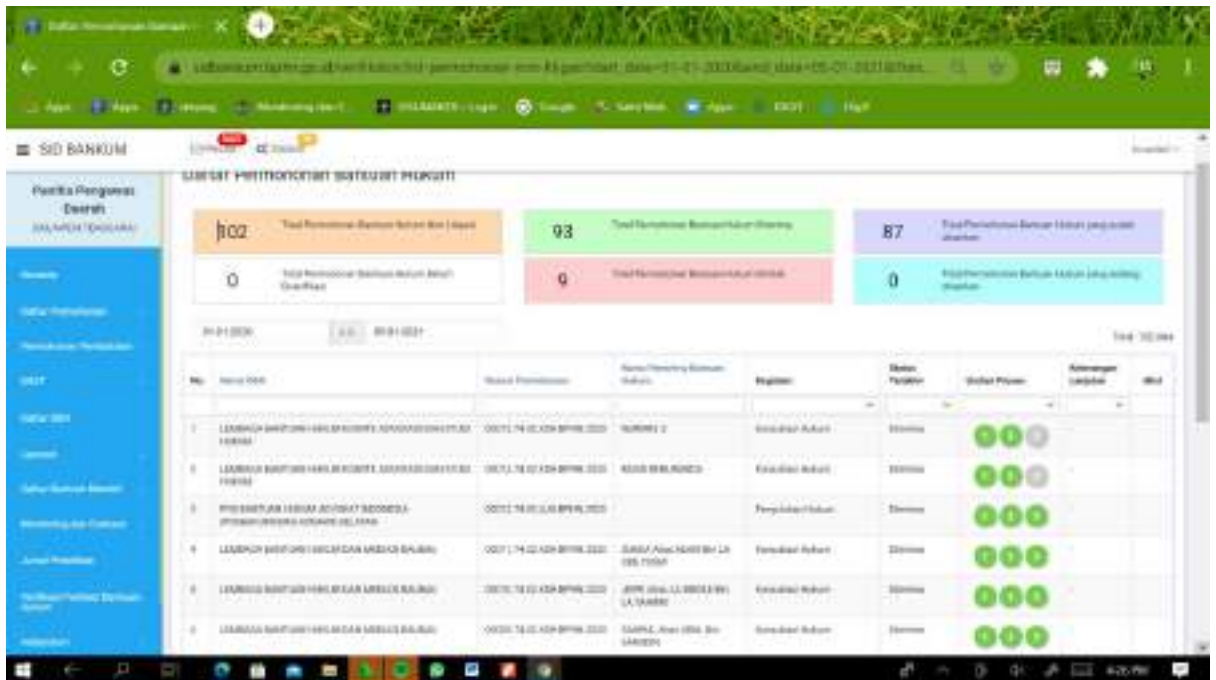
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$
Terwujudnya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang / kelompok masyarakat miskin	35 Kegiatan	35 Kegiatan	100%	17 Orang	34 Orang	200%

Analisis:

Target pada tahun lalu 35 Kegiatan dan realisasinya 35 akegiatan sehingga capaiannya 100%. Sedangkan target pada tahun ini 17 orang dan realisasinya sebesar 34 Orang sehingga capaiannya 200%. capaian pada tahun ini mengalami kenaikan dikarenakan oleh optimalisasi penyelenggaraan bantuan hukum non litigasi.

Tabel 3 67 kegiatan bantuan non litigasi

Jumlah penerima bantuan hukum non litigasi												Jumlah
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
0	0	0	4	7	3	0	0	0	11	9	0	34



c. Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah (W.10.1.c)

Tabel 3 68 Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = $4/3 \times 100\%$	6	7	8 = $7/6 \times 100\%$
Terwujudnya pembinaan hukum di wilayah	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Daerah	1 Daerah	100%	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%

Analisis:

Target pada tahun lalu 1 Daerah dan realisasinya 1 Daerah sehingga capaiannya 100%. Sedangkan target pada tahun ini 1 Kantor Wilayah dengan realisasinya 1 Kantor Wilayah

yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung sehingga capaiannya 100%. Capaian pada tahun ini sama dengan tahun lalu tercapai 100% dikarenakan oleh koordinasi kantor wilayah dengan instansi terkait.

Tabel 3 69 Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
-	1	2	2	2	-	-	-	-	1	-	1

d. Jumlah Penyuluh Hukum di Daerah (W.10.1.d)

Tabel 3 70 Jumlah Penyuluh Hukum di Daerah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$
Terwujudnya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah Penyuluh Hukum di Daerah	1 Daerah	1 Daerah	100%	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %

Analisis:

Target pada tahun lalu sebesar 1 Daerah dan realisasinya 1 Daerah sehingga capaiannya 100%. Sedangkan target pada tahun ini 1 Kantor Wilayah dengan realisasi 1 Kantor Wilayah sehingga capaiannya 100%. Capaian pada tahun ini sama dengan tahun lalu tercapai 100% dikarenakan oleh koordinasi penyuluh hukum kantor wilayah dengan instansi terkait.

Tabel 3 71 Jumlah kegiatan penyuluh hukum di Daerah

Jumlah Kegiatan Penyuluh Hukum di Daerah											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1

e. Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah (W.10.1.e)

Tabel 3 72 Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Terwujudnya pembinaan hukum di wilayah	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Daerah	1 Daerah	100%	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%

Analisis:

Target pada tahun lalu sebesar 1 Daerah dan realisasinya sebesar 1 Daerah sehingga capaiannya 100%. Sedangkan target pada tahun ini 1 Kantor Wilayah dengan realisasinya sebesar 1 Kantor Wilayah sehingga capaiannya 100%. Capaian pada tahun ini sama dengan tahun lalu tercapai 100% dikarenakan koordinasi yang dilaksanakan antara kantor wilayah dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Tabel 3 73 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah

Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	

f. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIH (W.10.1.f)

Tabel 3 74 Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Terwujudnya pembinaan hukum di wilayah	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIH	1 Daerah	Terlaksana	100%	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%

Analisis:

Target pada tahun lalu sebesar 1 Daerah dan realisasinya sebesar 1 Daerah sehingga capaiannya 100%. Sedangkan target pada tahun ini 1 Kantor Wilayah dengan realisasinya sebesar 1 Kantor Wilayah sehingga capaiannya 100%. Capaian pada tahun ini dapat dipertahankan sebesar 100% seperti tahun lalu dikarenakan pengelolaan informasi JDIIH di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara diselenggarakan dengan baik.

JDIIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara telah memasukkan koleksi produk-produk hukum yang dimiliki kedalam aplikasi website ILDIS versi 2.0 dengan jumlah koleksi dokumen sebagai berikut:

Tabel 3 75 Data Dokumen JDIIH tahun 2020

JENIS DOKUMEN		JUMLAH	KETERANGAN
A.	Peraturan Perundang-Undangan	41	Peraturan
	- Peraturan Perundang-Undangan Pusat	4	Peraturan
	- Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten	37	Peraturan
B.	Monografi Hukum	230	Dokumen
	- Buku Hukum	230	Buku
C.	Artikel / Majalah Hukum	23	Dokumen
	- Majalah Hukum Nasional	1	Majalah
	- Majalah Hukum	5	Majalah
	- Jurnal Hukum	14	Jurnal
	- Jurnal HAM	2	Jurnal
	- Warta BPHN	1	Warta
D.	Putusan Pengadilan	0	Dokumen
TOTAL PRODUK HUKUM		294	Dokumen

Tabel 3 76 Promosi Perpustakaan Hukum Online



Tabel 3 77 Statistik pengguna/ user JDIH



Program : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

a. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian / pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (W.11.1.a)

Tabel 3 78 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian / pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	20%	20%	100%	60%	60%	100%

Analisis:

Target pada tahun lalu sebesar 20% dan realisasinya sebesar 20% sehingga capaiannya 100%. Sedangkan target pada tahun ini 60% dengan realisasinya sebesar 60% sehingga capaiannya 100%, capaian pada tahun ini bertahan 100% karena terpenuhinya seluruh kegiatan.

Tabel 3 79 Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah

No	Kegiatan Kajian Wilayah	Waktu	Tempat
1	Kajian kegiatan sosialisasi cooperate university	1 Juni 2020	Kantor Wilayah
2	Kajian kegiatan sosialisasi IKM	2 Juni 2020	Kantor Wilayah
3	Kegiatan penelitian corporate university	27 Agustus 2020	RM. Mie garing
4	Kegiatan penelitian IKM	28 Agustus 2020	RM. Mie garing

b. Hasil penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan HAM yang disosialisasikan di wilayah (W.11.1.b)

Tabel 3 80 Hasil penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Hasil penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%

Analisis:

Target pada tahun lalu sebesar 1 Buku dan realisasinya sebesar 1 Buku sehingga capaiannya 100%. Sedangkan target pada tahun ini 1 Buku dengan realisasinya sebesar 1 Buku sehingga capaiannya 100%. capaian pada tahun ini bertahan 100% karena kegiatan telah terlaksana.

Tabel 3 81 Kegiatan sosialisasi hasil penelitian/ pengkajian Balitbang

No	Kegiatan Sosialisasi	Waktu	Tempat	Jumlah Peserta
1	Sosialisasi hasil penelitian	10 Agustus 2020	Hotel Blitz	30 orang

4. CAPAIAN KINERJA DIVISI PEMASYARAKATAN

a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan (W.05.1.a)

Tabel 3 82 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan di Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan dan perlakuan pelanggaran hukum yang berkualitas di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di wilayah	90%	Penilaian dilakukan di akhir tahun	Penilaian dilakukan di akhir tahun	7	7,952	113%

Analisis:

Realisasi kinerja tahun ini sebesar 7,952 sehingga didapat capaiannya sebesar 113%. Sedangkan perbandingan target dan capaian kinerja dengan tahun lalu tidak bisa diperbandingkan karena di tahun 2019 tidak ada indikator kinerja ini.

Tabel 3 83 Data Ikm Pada Upt Pemasyarakatan Di Wilayah Sulawesi Tenggara

NO	NAMA UPT	JUMLAH RESPONDEN/PENGUJUNG		INDEKS NILAI	NILAI HURUF	NILAI KUALITATIF
		L	P			
1	2	3		4	5	6
1	LAPAS KENDARI	102		93,2	9,32	SANGAT BAIK
2	LAPAS BAUBAU	150		74,029	7,40	BAIK
3	LPKA KENDARI	90	60	82	8,2	SANGAT BAIK
4	LPP KENDARI	32	39	67,85	6,785	BAIK
5	RUTAN KENDARI	73	77	79,5	7,95	BAIK
6	RUTAN KOLAKA	109		86,5	8,65	SANGAT BAIK
7	RUTAN RAHA	20	40	84,21	8,421	SANGAT BAIK
8	RUTAN UNAAHA	140	60	81.25	8,125	BAIK

NO	NAMA UPT	JUMLAH RESPONDEN/PENGUJUNG		INDEKS NILAI	NILAI HURUF	NILAI KUALITATIF
		L	P			
9	BAPAS KENDARI	62	18	82,5	8,25	SANGAT BAIK
10	BAPAS BAUBAU	25	5	80,20	8,02	BAIK
11	RUPBASAN KENDARI	21	10	63,53	6,353	BAIK
		JUMLAH RATA-RATA TOTAL		79,52	7,952	BAIK

b. Persentase UPT Pemasarakatan yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar (W.05.1.b)

Tabel 3 84 Persentase UPT Pemasarakatan yang disupervisi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$
Terlaksananya supervisi pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah	Persentase UPT Pemasarakatan yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	90 %	99,86%	110.95%

Analisis:

Realisasi kinerja untuk Tahun 2020 sebesar 99,86 % dengan capaian sebesar 110,95 %. Sedangkan perbandingan target dan capaian kinerja dengan tahun lalu tidak bisa dilakukan karena pada tahun lalu tidak terdapat indikator kinerja tersebut.

Salah satu tugas pokok pada Divisi Pemasarakatan adalah melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis pemasarakatan di wilayahnya. Pada DIPA Divisi Pemasarakatan Tahun 2020 tersedia anggaran sebesar Rp. 785.630.000,- untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah dan telah direalisasikan sebesar Rp. 784.532.100,-. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

**REKAPITULASI SK PEMBERIAN REMISI KHUSUS HARI RAYA KEAGAMAAN
TAHUN 2020 SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SDP VERSI 3.6.1
DI LAPAS/RUTAN WILAYAH SULAWESI TENGGARA**

NO	NAMA UPT	RK - I					RK - II					JUMLAH TOTAL
		15 hr	1 bl	1 bl 15 hr	2 bl	JML	15 hr	1 bl	1 bl 15 hr	2 bl	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	LAPAS KELAS IIA KENDARI	2	200	80	15	297	0	1	0	0	1	298
2	LAPAS KELAS IIA BAUBAU	0	154	32	5	191	0	0	1	0	1	192
3	LPKA KELAS II KENDARI	14	1	0	0	15	0	0	0	0	0	15
4	LPP KELAS III KENDARI	2	36	5	4	47	0	0	0	0	0	47
5	RUTAN KELAS IIA KENDARI	1	80	1	0	82	0	0	0	0	0	82
6	RUTAN KELAS IIB KOLAKA	0	57	5	0	62	0	2	0	0	2	64
7	RUTAN KELAS IIB RAHA	2	58	13	1	74	0	0	0	0	0	74
8	RUTAN KELAS IIB UNAAHA	10	71	9	0	90	0	0	0	0	0	90
JUMLAH		31	657	145	25	858	0	3	1	0	4	862

REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI ANAK DALAM RANGKA
HARI ANAK NASIONAL TANGGAL 23 JULI TAHUN 2020
SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SDP VERSI 3.6.1
DI LAPAS/RUTAN WILAYAH SULAWESI TENGGARA

N O	NAMA UPT	RAN - I							RAN - II							JUM LAH TOT AL
		1 bln	2 bl	3 bln	4 bln	5 bln	6 bln	JM L	1 bln	2 bl	3 bln	4 bln	5 bln	6 bln	JM L	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	LAPAS KELAS IIA KENDARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LAPAS KELAS IIA BAUBAU	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3	LPKA KELAS II KENDARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	LPP KELAS III KENDARI	9	1	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
5	RUTAN KELAS IIA KENDARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	RUTAN KELAS IIB KOLAKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	RUTAN KELAS IIB RAHA	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	RUTAN KELAS IIB UNAAHA	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		24	1	1	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI UMUM 17 AGUSTUS
TAHUN 2020 SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SDP VERSI 3.6.1
TAHUN 2020
DI LAPAS/RUTAN WILAYAH SULAWESI TENGGARA

NO	NAMA UPT	RU - I							RU - II							JUMLAH TOTAL
		1 bln	2 bl	3 bln	4 bln	5 bln	6 bln	JML	1 bln	2 bl	3 bln	4 bln	5 bln	6 bln	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	LAPAS KELAS IIA KENDARI	1	10	70	111	89	17	298	0	0	0	0	1	0	1	299
2	LAPAS KELAS IIA BAUBAU	73	55	99	36	29	5	297	0	0	0	0	0	0	0	297
3	LPKA KELAS II KENDARI	10	4	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
4	LPP KELAS III KENDARI	4	7	17	14	6	4	52	0	0	0	0	0	0	0	52
5	RUTAN KELAS IIA KENDARI	61	53	73	12	0	0	199	0	0	1	0	0	0	1	200
6	RUTAN KELAS IIB KOLAKA	21	7	32	27	5	0	92	1	0	0	0	1	0	2	94
7	RUTAN KELAS IIB RAHA	34	17	42	16	13	1	123	0	0	0	0	1	0	1	124
8	RUTAN KELAS IIB UNAAHA	20	8	25	27	11	0	91	0	0	0	1	3	0	4	95
JUMLAH		224	161	359	243	153	27	1.167	1	0	1	1	6	0	9	1.176

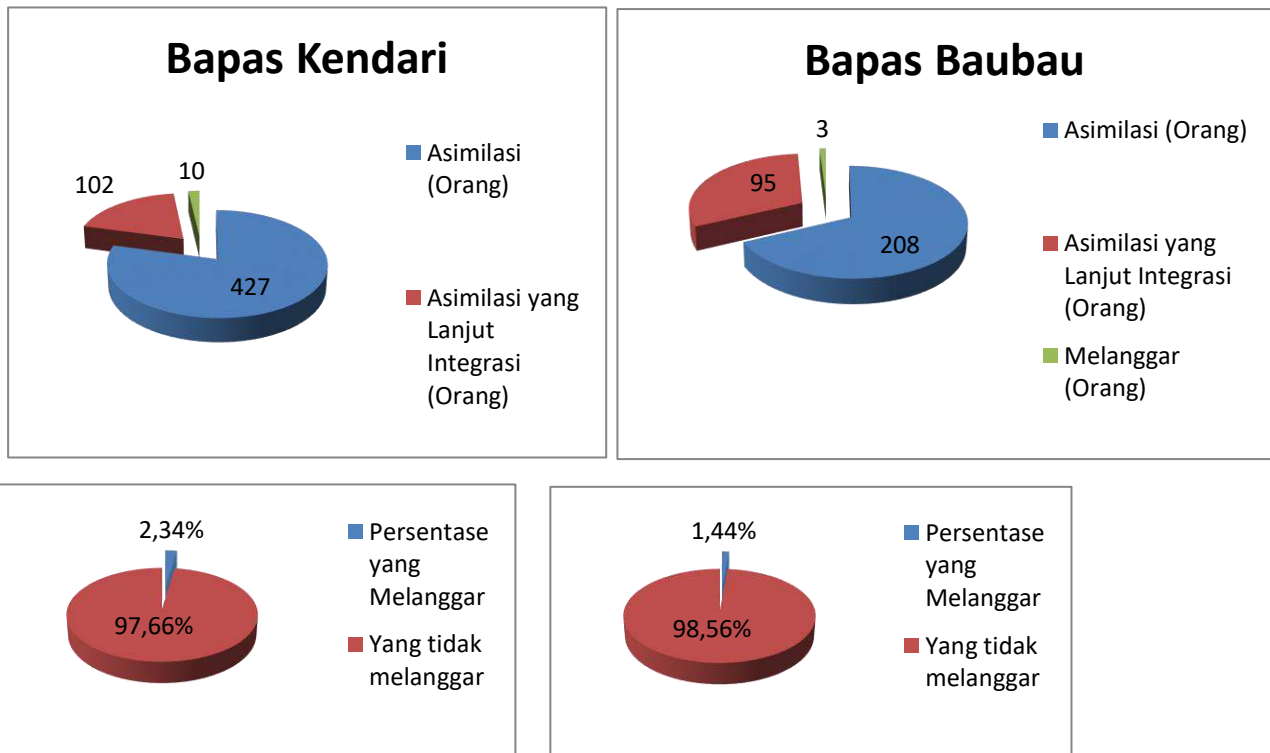
**REKAPITULASI PEMBERIAN CB DAN PB MELALUI APLIKASI SDP VERSI 3.6.1
TAHUN 2020
DI LAPAS/RUTAN WILAYAH SULAWESI TENGGARA**

NO	NAMA UPT	USULAN				SK YANG TERBIT			
		PB	CB	CMB	ASIMILASI	PB	CB	CMB	ASIMILASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LAPAS KELAS IIA KENDARI	136	5	0	51	152	5	0	70
2	LAPAS KELAS IIA BAUBAU	100	84	0	91	62	27	0	83
3	LPKA KELAS III KENDARI	19	11	0	40	7	11	0	40
4	LPP KELAS II KENDARI	24	8	0	23	12	7	0	13
5	RUTAN KELAS IIA KENDARI	24	105	0	118	31	90	0	118
6	RUTAN KELAS IIB KOLAKA	13	25	0	92	16	20	0	106
7	RUTAN KELAS IIB RAHA	65	117	0	1	62	99	0	22
8	RUTAN KELAS IIB UNAAHA	15	53	0	4	21	54	0	50
JUMLAH		396	408	0	420	363	313	0	502

**Data Narapidana yang Menjalani Asimilasi Rumah menurut Permenkumham No 10
Tahun 2020 di Lingkup Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara**

No	Balai Pemasarakatan	Asimilasi (Orang)	Asimilasi yang Lanjut Integrasi (Orang)	Melanggar (Orang)	Persentase yang Melanggar
1	Bapas Kendari	427	102	10	2.34%
2	Bapas Baubau	208	95	3	1.44%
	Total	635	197	13	2.05%

Grafik



DATA PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DI UPT LAPAS PEREMPUAN KELAS III KENDARI & LAPAS KELAS IIA KENDARI BEKERJASAMA DENGAN INSTANSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PADA TAHUN 2020

No	Nama UPT	Kegiatan	Keterangan			
			Narapidana yang mengikuti Rehab	Tahanan yang mengikuti Rehab	Jumlah Petugas Perawat yang Menangani Rehab	Jangka Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	LPP KELAS III KENDARI	REHABILITASI SOSIAL	30 Orang	-	3 orang	6 Bulan
2	LAPAS KELAS IIA KENDARI	REHABILITASI SOSIAL	60 Orang	-	3 orang	6 Bulan

c. TERWUJUDNYA PRODUKTIVITAS NARAPIDANA MENUJU MANUSIA MANDIRI YANG BERDAYA GUNA (W.05.2.b)

Tabel 3 85 Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Terwujudnya produktivitas narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	100 %	100%	100%

Analisis:

Realisasi kinerja untuk Tahun 2020 sebesar 100 % dengan capaian sebesar 100 %. Sedangkan perbandingan target dan capaian kinerja dengan tahun lalu tidak bisa dilakukan karena pada tahun lalu tidak terdapat indikator kinerja tersebut. Adapun rinciannya target pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

No	UPT	Layanan Pembinaan Narapidana			Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak		
		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran
				(Rp)			(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lapas Kelas IIA Kendari	300 orang narapidana	300 orang	574.500.000			
2	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	100 orang narapidana	100 orang	191.500.000			
3	LPKA Kelas II Kendari				44 orang	44 orang	46.600.000

Ket:

300 orang WBP di Lapas Kelas IIA kendari yang meliputi 6 jenis kegiatan pelatihan yaitu pertukangan kayu, pertukangan batu, las fabrikasi, kegiatan agribisnis pertanian dan hidroponik,perbengkelan motor dan agribisnis budidaya ikan air tawar. Adapun kegiatan pembinaan kemandirian pada Lapas Perempuan Kelas III Kendari dilakukan dengan mengikut sertakan 100 orang WBP yang dibuat dalam lima paket kegiatan pelatihan yaitu merajut, pelatihan tata kecantikan, tata boga, hidroponik dan menjahit dasar. Dan untuk di LPKA Kelas IIA kendari bari dilaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian kepada 44 orang anak binaan dengan kegiatan pembuatan handy craft dan hidroponik pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bersertifikat dengan instansi mitra kerja sama tentang pelatihan keterampilan Tahap I bagi warga binaan pada Lapas di wilayah Sulawesi tenggara telah dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi 444 (empat ratus empat puluh empat) orang warga binaan masyarakat dari target sebanyak 444 orang WBP dengan melibatkan mitra dari Balai Latihan Keterampilan Kendari. Pelaksanaan kegiatan meliputi pelatihan Pertukangan,Hidroponik, Handy Craft dan Merajut bagi narapidana (laporan pelaksanaan kegiatan terlampir). Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama masa pandemic corona. Jumlah narapidana yang diikutkan setiap tahap dibatasi demi keamanan dan keselamatan WBP dengan adanya wabah corona ini.

d. TERWUJUDNYA MANTAN NARAPIDANA ANAK YANG TAAT HUKUM (W.05.3)

Tabel 3 86 Menurunnya persentase residivis

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$
Terwujudnya Mantan Narapidana Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	1 %	3%	300%

Analisis:

Realisasi kinerja untuk tahun 2020 sebesar 0,90 % dengan capaian sebesar 90 %. Sedangkan perbandingan target dan capaian kinerja dengan tahun lalu tidak bisa dilakukan karena pada tahun lalu tidak terdapat indikator kinerja tersebut. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

DATA NARAPIDANA RESIDIVIS DEWASA PADA UPT LAPAS/RUTAN SE SULAWESI TENGGARA

Tabel 3 87 Data residivis dewasa

NO	UPT	2019	2020
1	LAPAS KELAS IIA BAU	7 ORANG	36 ORANG
2	LAPAS KELAS IIA KENDARI	11 ORANG	10 ORANG
3	LPP KELAS III KENDARI	1 ORANG	4 ORANG
4	RUTAN KELAS IIA KENDARI	28 ORANG	70 ORANG
5	RUTAN KELAS IIB KOLAKA	26 ORANG	21 ORANG
6	RUTAN KELAS IIB RAHA	45 ORANG	25 ORANG
7	RUTAN KELAS IIB UNAAHA	27 ORANG	19 ORANG
JUMLAH		145 ORANG	185 ORANG

Tabel 3 88 Persentase Residivis Keseluruhan (Dewasa + Anak)

TARGET	NARAPIDANA DEWASA / ANAK RESIDIVIS TAHUN 2020	NARAPIDANA DEWASA / ANAK RESIDIVIS TAHUN 2019	PENURUNAN RESIDIVIS
1 % \approx 0.01	185 + 9 = 194	145+8=153	0,10789-0,078 = 0.02989 x 100%
JUMLAH NARAPIDANA	1.798	1.961	
HASIL CAPAIAN	$\frac{194}{1798}=0.10789$	$\frac{153}{1961}=0.078$	3%

e. TERWUJUDNYA PEMENUHAN HAK ANAK (W.05.4)

Tabel 3 89 Persentase anak yang melanjutkan pendidikan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8 = 7/6x100%
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	55 %	83,33%	151,51%

Analisis:

Realisasi kinerja untuk Tahun 2020 sebesar 83,33% dengan capaian sebesar 151,51 %. Sedangkan perbandingan target dan capaian kinerja dengan tahun lalu tidak bisa dilakukan karena pada tahun lalu tidak terdapat indikator kinerja tersebut. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 90 Anak yang mendapatkan pendidikan

NO	TARGET	JUMLAH ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN PADA LPKA KELAS IIA KENDARI	ANGGARAN DIPA	TARGET ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5
1	55%	30 Orang anak telah mengikuti kegiatan Paket C pada bulan Desember 2020	Rp.900.000	36 ORANG ANAK
Persentase :30/36 x 100%= 83,33%				

Tabel 3 91 Anak yang melanjutkan pendidikan

TARGET	JUMLAH ANAK YANG MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA LAPAS / RUTAN DIWILAYAH SULAWESI TENGGARA	
	2019	2020
1	2	
55%	33 orang	30 orang
	% TARGET YANG TERCAPAI = 83,33%	
	% REALISASI YANG TERCAPAI=151,51%	

Tabel 3 92 Klasifikasi anak

No	Periode	Klasifikasi										
		Anak			Total	Kegiatan						
		AN	AS	AP		PD	PJ	PR	PS	PK	PB	AK
1	Januari	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28	0
2	Februari	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	1
3	Maret	0	0	41	41	41	41	41	41	41	41	0
4	April	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	3
5	Mei	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	2
6	Juni	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	1
7	Juli	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	3
8	Agustus	0	0	41	41	41	41	41	41	41	41	2
9	September	0	0	38	35	35	35	35	35	35	35	2
10	Oktober	0	0	35	34	34	34	34	34	34	34	1
11	Nopember	0	0	37	36	36	36	36	36	36	36	1
12	Desember											

KETERANGAN

AN : Anak Negara
AS : Anak Sipil
AP : Anak Pidana
PD : Anak Peserta Pendidikan
PJ : Peserta Pembinaan Jasmani
PR : Peserta Pembinaan Rohani
PS : Peserta Konseling
PK : Peserta Keterampilan
PB : Peserta Kegiatan Bakat Seni
AK : Anak Kasus Narkoba

DATA ANAK YANG MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LPKA KELAS II KENDARI



Tabel 3 93 Data anak yang melanjutkan pendidikan di LPKA kendari

BULAN												JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	34	41	17	18	16	24	41	35	34	36	36	360

REKAPITULASI PNBP RESOLUSI PEMASYARAKATAN TAHUN 2020

Tabel 3 94 REKAPITULASI PNBP RESOLUSI PEMASYARAKATAN TAHUN 2020

NO	SATKER	TARGET AKHIR	JUMLAH REALISASI	SELISIH	CAPAIAN REALISASI (%)
1	LAPAS KELAS II A BAUBAU	14.070.000	14.934.300	864.300	106
2	LAPAS KELAS II A KENDARI	19.075.000	22.212.500	3.137.500	116
3	LAPAS PEREMPUAN KELAS III KENDARI	2.730.000	5.135.525	2.405.525	188
4	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KENDARI	0	-	-	0
5	RUTAN KELAS II A KENDARI	13.685.000	13.685.000	-	100
6	RUTAN KELAS II B KOLAKA	7.210.000	7.212.000	2.000	100
7	RUTAN KELAS II B RAHA	7.350.000	14.862.500	7.512.500	202
8	RUTAN KELAS II B UNAAHA	7.070.000	7.070.000	-	100
TOTAL		71.190.000	85.111.825	13.921.825	120

 = Target PNBP sudah tercapai/ terlampaui
 = Tidak ada target



DATA PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DI UPT LAPAS PEREMPUAN KELAS III KENDARI & LAPAS KELAS IIA KENDARI
BEKERJASAMA DENGAN INSTANSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PADA TAHUN 2020

Tabel 3 95 Rehabilitas Sosial

No	Nama UPT	Kegiatan	Keterangan			
			Narapidana yang mengikuti Rehab	Tahanan yang mengikuti Rehab	Jumlah Petugas Perawat yang Menangani Rehab	Jangka Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	LPP KELAS III KENDARI	REHABILITASI SOSIAL	30 Orang	-	3 orang	6 Bulan
2	LAPAS KELAS IIA KENDARI	REHABILITASI SOSIAL	60 Orang	-	3 orang	6 Bulan



f. TERWUJUDNYA PRODUKTIVITAS NARAPIDANA MENUJU MANUSIA MANDIRI YANG BERDAYA GUNA (W.05.2.b)

Tabel 3 96 Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$
Terwujudnya produktivitas narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	100 %	21,36%	21,36%

Analisis:

Realisasi kinerja sebesar 21,36 % dengan capaian sebesar 21,36 %. Sedangkan perbandingan target dan capaian kinerja dengan tahun lalu tidak bisa dilakukan karena pada tahun lalu tidak terdapat indikator kinerja tersebut. Realisasi sangat rendah hal ini karena adanya wabah virus corona. Adapun rinciannya target pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 97 Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat

No	Unit Pelaksana Teknis	Layanan Pembinaan Narapidana			Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak		
		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	4	5	6	6
1	Lapas Kelas IIA Kendari	300 orang	60 orang	574.500.000			
2	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	100 orang	20 orang	191.500.000			
3	LPKA Kelas II Kendari				40 orang	14 orang	46.600.000

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan sempat tertunda karena adanya wabah Covid 19, Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bersertifikat dengan instansi mitra kerja sama tentang pelatihan keterampilan Tahap I bagi warga binaan pada Lapas di wilayah Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi 94 (sembilanpuluh empat) orang warga binaan masyarakat dari target sebanyak 440 orang WBP dengan melibatkan mitra dari Balai Latihan Keterampilan Kendari. Pelaksanaan kegiatan meliputi pelatihan Pertukangan, Hidroponik, Handy Craft dan Merajut bagi narapidana (laporan pelaksanaan kegiatan terlampir). Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama

masa pandemic corona. Jumlah narapidana yang diikuti setiap tahap dibatasi demi keamanan dan keselamatan WBP dengan adanya wabah corona ini

g. TERWUJUDNYA PEMENUHAN HAK ANAK (W.05.4)

Tabel 3 98 Persentase anak yang melanjutkan pendidikan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	Tidak ada indikator ini di tahun 2019	55 %	44,44%	80.8%

Analisis:

Realisasi kinerja sebesar 44,44%% dengan capaian sebesar 80,8 %. Sedangkan perbandingan target dan capaian kinerja dengan tahun lalu tidak bisa dilakukan karena pada tahun lalu tidak terdapat indikator kinerja tersebut. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

NO	TARGET	JUMLAH ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN PADA LPKA KELAS IIA KENDARI	ANGGARAN DIPA	TARGET ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5
1	55%	16 Orang anak telah mengikuti ujian Paket C pada bulan Mei 2020	Rp.900.000	36 ORANG ANAK
Persentase : $\frac{16}{36} \times 100\% = 44,44\%$				

No	UPT	Kanwil	Klasifikasi											
			Anak			Total	Kegiatan							
			AN	AS	AP		PD	PJ	PR	PS	PK	PB	AK	
1	LAPAS KELAS II A BAUBAU	KANWIL SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LAPAS KELAS II A KENDARI	KANWIL SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	UPT	Kanwil	Klasifikasi										
			Anak			Total	Kegiatan						
			AN	AS	AP		PD	PJ	PR	PS	PK	PB	AK
3	LAPAS PEREMPUAN KELAS III KENDARI	KANWIL SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KENDARI	KANWIL SULAWESI TENGGARA	0	0	16	16	16	16	16	0	0	0	1
5	RUTAN KELAS II A KENDARI	KANWIL SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	RUTAN KELAS II B KOLAKA	KANWIL SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	RUTAN KELAS II B RAHA	KANWIL SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	RUTAN KELAS II B UAAHA	KANWIL SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0	0	16	16	16	16	16	0	0	0	1

KETERANGAN

AN : Anak Negara
AS : Anak Sipil
AP : Anak Pidana
PD : Anak Peserta Pendidikan
PJ : Peserta Pembinaan Jasmani
PR : Peserta Pembinaan Rohani
PS : Peserta Konseling
PK : Peserta Keterampilan
PB : Peserta Kegiatan Bakat Seni
AK : Anak Kasus Narkoba

B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (RALISASI ANGGARAN)

1. DIVISI ADMINISTRASI

Tabel 3 99 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Divisi Administrasi

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	17.936.168	17.896.103	99,78
1558 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	17.936.168	17.896.103	99,78
1558.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.158.017	2.151.989	99,72
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	44.200	44.200	100
054 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	2.113.817	2.107.789	99,71
A Pembangunan/Revovasi Gedung dan Bangunan	2.113.817	2.107.789	99,71
1558.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	3.628.133	3.609.975	99,5
051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	239.694	238.679	99,58
A Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran	98.059	98.010	99,95
B Koordinasi, Konsultasi dan Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran	80.100	80.074	99,97
C Supervisi Pagu Indikatif dan Hasil RKA-K/L Pagu Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah	61.535	60.595	98,47
052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	246.918	240.009	97,2
A Monitoring Penyusunan Program, Pelaporan dan Kehumasan	137.238	131.103	95,53
B Monitoring Pengelolaan Keuangan, BMN dan Kepegawaian	109.680	108.906	99,29
053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	323.820	322.939	99,73
A Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan	323.820	322.939	99,73
054 Pengelolaan kepegawaian	330.280	327.541	99,17
A Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	91.560	89.579	97,84
B Bapperjakat Eselon IV dan V	4.720	4.720	100
D Pelaksanaan Ujian Dinas Tk I, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penilaian JFT	2.240	2.240	100
E Bina Mental Pegawai	2.000	1.600	80
F Orientasi CPNS	5.220	5.220	100
G Pengadaan CPNS	224.540	224.182	99,84
055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	2.190.788	2.186.718	99,81
A Pembinaan dan Pengelolaan BMN	4.000	4.000	100
B Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	54.850	52.200	95,17
D Penanganan dan Pencegahan Covid-19	2.131.938	2.130.518	99,93

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
056 Reformasi Birokrasi di Wilayah	189.101	188.987	99,94
A Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	16.914	16.900	99,92
B Pembentukan Satuan Kerja WBK/WBBM	150.375	150.275	99,93
C Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	21.812	21.812	100
057 Layanan Humas, Protokol dan Teknologi Informasi	107.532	105.102	97,74
A Layanan Humas, Protokol dan Teknologi Informasi	107.532	105.102	97,74
1558.994 Layanan Perkantoran	12.150.018	12.134.139	99,87
001 Gaji dan Tunjangan	9.112.127	9.108.966	99,97
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	9.067.550	9.064.404	99,97
B Belanja Lembur dan Uang Makan Lembur	44.577	44.562	99,97
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.037.891	3.025.173	99,58
A Kesehatan Pegawai	5.000	5.000	100
B Pakaian Dinas (Pakaian)	137.300	137.077	99,84
C Pemeliharaan Gedung	92.795	92.768	99,97
D Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	57.000	55.841	97,97
E Pemeliharaan Kendaraan	440.798	440.416	99,91
F Langganan Daya dan Jasa	226.000	216.408	95,76
G Keperluan Perkantoran	891.712	891.704	100
H Konsultasi dan Koordinasi	259.280	259.068	99,92
I Pelantikan / Sumpah Jabatan	33.200	33.178	99,93
J Jamuan Tamu Pimpinan	100.000	99.815	99,82
K Honor Operasional Satker	168.120	167.220	99,46
L Sewa Operasional Perkantoran	616.686	616.678	100
M Penanganan dan Pencegahan COVID-19	10.000	10.000	100

2. DIVISI IMIGRASI

Tabel 3 100Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Divisi Imigrasi

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.428.639	1.105.942	77,41
5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.428.639	1.105.942	77,41
5254.016 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	1.150.809	993.838	86,36
001 Tanpa Sub Output	1.150.809	993.838	86,36
051 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Fasilitatif Fungsi Keimigrasian	1.000.853	875.020	87,43

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
A Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program, kegiatan dan Anggaran	58.803	49.460	84,11
B Koordinasi dan Pengelolaan SDM, Sarana Prasarana dan Administrasi Keuangan	432.990	422.584	97,6
C Penanganan dan Pencegahan Covid -19	509.060	402.976	79,16
052 Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian	149.956	118.818	79,24
A Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama, Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	75.098	48.619	64,74
B Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama, Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	74.858	70.199	93,78
5254.017 Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	277.830	112.104	40,35
001 Koordinasi Tim PORA	37.560	17.942	47,77
051 Penyusunan Materi	4.860	3.842	79,05
052 Koordinasi dan Pembahasan	32.700	14.100	43,12
U03 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Timur	137.580	67.217	48,86
051 Perencanaan	3.000	2.773	92,43
052 Pengumpulan Data dan Informasi	126.000	62.112	49,3
053 Pengolahan Data dan Informasi	5.580	764	13,69
054 Penyajian Laporan	3.000	1.569	52,29
U06 Operasi Mandiri Wilayah Timur	48.720	19.366	39,75
051 Persiapan Rencana Kegiatan	1.860	0	0
052 Pelaksanaan Pengawasan	44.000	19.040	43,27
053 Penyusunan Laporan dan Evaluasi	2.860	326	11,38
U09 Operasi Gabungan Wilayah Timur	25.610	7.579	29,59
051 Persiapan Rencana Kegiatan	930	925	99,46
052 Pelaksanaan	23.250	6.654	28,62
053 Penyusunan Laporan dan Evaluasi	1.430	0	0
U12 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur	28.360	0	0
051 Penyelidikan	8.660	0	0
052 Penyidikan	19.700	0	0
A Permulaan	2.120	0	0
B Olah TKP	4.500	0	0
C Upaya Paksa	5.000	0	0
D Pemeriksaan	5.080	0	0
E Penyerahan Berkas Perkara	2.000	0	0
F Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti	1.000	0	0

3. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM 1) PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM

Tabel 3 101 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Pembentukan Hukum

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
06 Program Pembentukan Hukum	119.187	116.732	97,94
5250 Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum	119.187	116.732	97,94
5250.001 Fasilitas pembentukan produk hukum daerah	112.482	110.027	97,82
051 Melakukan fasilitas harmonisasi perundang-undangan	89.816	89.438	99,58
A Persiapan	3.685	3.396	92,16
B Pelaksanaan	82.131	82.042	99,89
C Penyusunan Laporan	1.000	1.000	100
E Penanganan dan Pencegahan Covid-19	3.000	3.000	100
052 Menginventarisasi, klasifikasi, dan pengarsipan	22.666	20.589	90,84
A Persiapan	3.606	1.889	52,38
B Pelaksanaan	18.560	18.200	98,06
C Penyusunan Laporan	500	500	100
5250.002 Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	6.705	6.705	100
051 Melakukan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan	3.357	3.357	100
A Persiapan	1.795	1.795	100
B Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan	1.062	1.062	100
C Penyusunan Laporan	500	500	100
055 Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang-undangan	3.348	3.348	100
A Pelaksanaan	3.098	3.098	100
B Penyusunan Laporan	250	250	100

2) PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tabel 3 102 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Pembinaan Hukum Nasional

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
12 Program Pembinaan Hukum Nasional	1.821.229	1.807.006	99,22
5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	1.821.229	1.807.006	99,22

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
5256.001 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.296.000	1.293.000	99,77
051 Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa	1.296.000	1.293.000	99,77
A Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan	482.000	482.000	100
B Tahap Persidangan/Putusan di Pengadilan	774.000	774.000	100
C Tahap Persidangan/Putusan Pengadilan	14.000	11.000	78,57
D Pembayaran Hutang Kegiatan Bantuan Hukum	2.000	2.000	100
E Pembayaran Hutang Kegiatan Bantuan Hukum	24.000	24.000	100
5256.002 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	86.750	85.495	98,55
051 Penyebarluasan Informasi dan Penanganan	71.420	70.455	98,65
A Penyuluhan Hukum	29.920	29.505	98,61
B Pemberdayaan Masyarakat	4.000	3.950	98,75
C Penelitian Hukum	20.000	20.000	100
E Mediasi	1.000	1.000	100
F Pendampingan di luar Pengadilan	16.500	16.000	96,97
052 Konseling dan Dokumen Hukum	15.330	15.040	98,11
A Konsultasi Hukum	1.540	1.540	100
B Drafting Dokumen Hukum	13.500	13.500	100
C Investigasi Perkara	290	0	0
5256.003 Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	81.817	81.574	99,7
051 Pemantauan dan Evaluasi Oleh Panitia	81.817	81.574	99,7
A Pemantauan dan Evaluasi Oleh Panitia	81.817	81.574	99,7
5256.004 Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa Sadar Hukum	154.748	151.435	97,86
051 Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung	92.220	90.315	97,93
A Ceramah Hukum Terpadu	92.220	90.315	97,93
053 Pembinaan/Pembentukan Desa/kelurahan	62.528	61.120	97,75
A Pendampingan Peserta Lomba Kadarkum	44.400	43.600	98,2
B Evaluasi/Pembinaan Kelompok Kadarkum	18.128	17.520	96,65
5256.005 Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	95.911	94.955	99
051 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademi	32.930	32.373	98,31
052 Analisa dan Evaluasi Hukum	62.981	62.582	99,37

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
5256.006 Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	106.003	100.548	94,85
051 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan	47.645	47.640	99,99
052 Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan	23.657	21.633	91,44
053 Peningkatan Layanan Perpustakaan	34.701	31.275	90,13
B Penanganan dan Pencegahan COVID 19	10.000	10.000	100

3) PROGRAM PEMBINAAN / PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tabel 3 103 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
09 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	704.732	683.603	97
5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor	704.732	683.603	97
5253.001 Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor	587.435	577.426	98,3
051 Penyelesaian Penerimaan Permohonan KI	184.942	181.000	97,87
A Menyelesaikan Penerimaan Permohonan	47.685	47.421	99,45
B Pendampingan Pengajuan Permohonan	91.477	89.327	97,65
C Koordinasi dengan Instansi Terkait	45.780	44.252	96,66
052 Melaksanakan Promosi dan Diseminasi	402.493	396.427	98,49
A Promosi dan Diseminasi Desain Ind	156.525	156.001	99,67
B Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual	111.834	111.047	99,3
C Sosialisasi Promosi dan Diseminasi	104.134	99.379	95,43
D Percepatan Pencegahan dan Penanganan	30.000	30.000	100
5253.002 Penegakan Hukum Bidang KI di Wilayah	117.297	106.177	90,52
051 Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	63.665	55.165	86,65
A Kerjasama Pengawasan Potensi Pelanggaran	63.665	55.165	86,65
052 Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran	53.632	51.012	95,11
A Penyelidikan/ Penyidikan/ Pengawasan	53.632	51.012	95,11

4) PROGRAM ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Tabel 3 104 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Administrasi Hukum Umum

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
07 Program Administrasi Hukum Umum	2.128.000	1.631.840	76,68
5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	2.128.000	1.631.840	76,68
5251.001 Layanan Administrasi Hukum Umum pada Wilayah	1.544.074	1.231.038	79,73
051 Layanan AHU pada Divisi Pelayanan Hukum	492.238	467.292	94,93
A Layanan Notariat	36.600	25.197	68,84
B Layanan Kewarganegaraan	500	0	0
C Layanan Administrasi PPNS	17.250	6.425	37,25
D Layanan Advokasi	437.888	435.670	99,49
052 Peningkatan Layanan AHU di Wilayah	440.544	303.507	68,89
C Peningkatan Manfaat Layanan AHU	102.480	47.383	46,24
D Peningkatan Layanan AHU	99.914	43.124	43,16
E Penanganan dan Pencegahan COVID-19	238.150	213.000	89,44
053 Penyebaran Informasi Layanan AHU di Wilayah	611.292	460.239	75,29
A Publikasi Layanan AHU di Wilayah	216.710	150.394	69,4
B Sosialisasi Layanan AHU di Wilayah	394.582	309.846	78,52
5251.002 Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	583.926	400.802	68,64
001 Tanpa Sub Output	583.926	400.802	68,64
051 Layanan MKNW	238.328	202.178	84,83
A Permohonan Pemanggilan Notaris	105.738	78.907	74,63
B Tim Evaluasi dan Investigasi Nota	132.590	123.271	92,97
052 Layanan MPW	120.592	49.877	41,36
A Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan MPW	120.592	49.877	41,36
053 Layanan MPD	225.006	148.747	66,11
A Tindak Lanjut Laporan Pengaduan	208.002	143.703	69,09
B Pemeriksaan Protokol Notaris	4.704	500	10,63
C Pelantikan MPD	12.300	4.544	36,94

5) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tabel 3 105 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Penelitian dan Pengembangan

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	58.221	57.190	98,23
5248 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	58.221	57.190	98,23
5248.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan	58.221	57.190	98,23
052 Pengkajian hukum dan hak asasi manusia di wilayah	39.041	38.045	97,45
A Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	39.041	38.045	97,45
053 Pengembangan hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah	19.180	19.145	99,82

6) PROGRAM PEMAJUAN HAM

Tabel 3 106 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Program Pemajuan HAM

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
11 Program Pemajuan HAM	239.412	237.484	99,19
5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	239.412	237.484	99,19
5255.001 Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	89.212	88.294	98,97
001 Pelayanan Komunikasi Masyarakat	55.561	54.803	98,64
051 Penelaahan Komunikasi Masyarakat	1.320	1.320	100
052 Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat	53.092	52.483	98,85
A Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Ibu kota Provinsi	9.980	9.380	93,99
B Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kab/Kota	31.656	31.653	99,99
C Penyusunan Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	1.456	1.450	99,59
D Penanganan dan Pencegahan COVID-19	10.000	10.000	100
053 Penyusunan Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat di wilayah	1.149	1.000	87,03
002 Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	18.000	17.974	99,86
052 konsultasi teknis penyelenggaraan pemajuan HAM ke Pusat	18.000	17.974	99,86

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
003 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil	14.223	14.191	99,78
051 Inventarisasi dan Identifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah	5.384	5.360	99,55
052 FGD Evaluasi Rancangan Produk hukum daerah	8.354	8.346	99,9
053 Telaahan dan rekomendasi Rancangan Produk hukum daerah	485	485	100
A Telaahan dan rekomendasi Rancangan Produk hukum daerah Kab/kota hasil FGD	485	485	100
004 Data Pemajuan HAM di Wilayah	1.428	1.326	92,86
051 Persiapan Penyusunan Data Pemajuan HAM di Wilayah	729	646	88,61
A Identifikasi Bahan Informasi dan Dokumentasi HAM	729	646	88,61
052 Pengumpulan dan Pengolahan Data	500	482	96,4
A Pengumpulan dan Pengolahan Data	500	482	96,4
053 Penyampaian Data Pemajuan HAM di Wilayah	199	198	99,5
A Penyusunan Laporan Program Pemajuan HAM	199	198	99,5
5255.002 Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	150.200	149.190	99,33
001 Aksi HAM Pemerintah Daerah	29.352	29.179	99,41
051 Evaluasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	9.846	9.777	99,3
052 Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	19.506	19.402	99,47
A Rapat Kerja Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	10.346	10.278	99,34
B Koordinasi dengan Pemerintah Daerah	9.160	9.124	99,61
002 Kab/Kota Peduli HAM	51.396	50.771	98,78
051 Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Kab/Kota Peduli HAM	15.521	15.515	99,96
052 Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM	35.875	35.256	98,27
A Rapat Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM	15.771	15.163	96,14
B Pemeriksaan data usulan kriteria Kab/Kota Peduli HAM	824	819	99,39
C Koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang Kab/Kota Peduli HAM	19.280	19.274	99,97
003 Diseminasi HAM di Wilayah	69.452	69.240	99,69
051 Persiapan Diseminasi HAM Kab/Kota	2.400	2.396	99,83
052 Pelaksanaan Diseminasi HAM di Kab/Kota	24.448	24.304	99,41
053 Monev Pelaksanaan Diseminasi HAM di Kab/Kota	42.104	42.064	99,91
054 Pelaporan Pelaksanaan Diseminasi HAM di Kab/Kota	500	476	95,20

4. DIVISI PEMASYARAKATAN

Tabel 3 107 Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Divisi Pemasyarakatan

Keterangan	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	785.630	784.523	99,86
5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	785.630	784.523	99,86
5252.003 Pembinaan UPT Pemasyarakatan	670.560	669.799	99,89
001 Pembinaan Administratif Layanan Pemasyarakatan	56.220	55.678	99,04
051 Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban	26.560	26.176	98,55
A Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban	26.560	26.176	98,55
052 Pembinaan Layanan WBP	17.160	17.152	99,95
A Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	17.160	17.152	99,95
053 Layanan Kerjasama, Komunikasi dan Informasi	12.500	12.350	98,8
D Unit Layanan Informasi	12.500	12.350	98,8
S28 PEMBINAAN UPT PEMASYARAKATAN SULAWESI TENGGARA	614.340	614.121	99,96
051 Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Tenggara	44.430	44.428	100
A Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Tenggara	44.430	44.428	100
052 KONSULTASI TEKNIS PEMASYARAKATAN	77.800	77.736	99,92
A Konsultasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi	77.800	77.736	99,92
053 KOORDINASI TEKNIS PEMASYARAKATAN	84.240	84.169	99,92
A Koordinasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi	42.120	42.120	100
B Koordinasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan	42.120	42.049	99,83
054 PENGENDALIAN UPT PEMASYARAKATAN	407.870	407.789	99,98
A Pencegahan dan Penindakan Kamtib	183.110	183.100	99,99
B Mutasi/Pemindahan	6.800	6.800	100
C Monitoring dan Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan	24.680	24.617	99,95
D Penanganan dan Pencegahan COVID-19	3.280	3.272	99,99
051 Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum (Peran Serta Masyarakat)	15.070	14.725	99,7

BAB IV KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Alporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun pertama atas pelaksanaan RPJMN 2020 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Sasaran yang dicapai pada tahun 2020 rata-rata sudah dapat dicapai.
2. Sasaran yang dicapai pada tahun 2020 kebanyakan tidak bisa diperbandingkan karena tidak ada indikator yang sama pada tahun lalu.
3. Ada beberapa sasaran yang capaiannya menurun akibat pandemi covid-19

B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;

2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang pemasyarakatan pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
 - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lapas, Rutan, Bapas maupun Rupbasan.
 - c. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang hukum dan HAM pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan hukum dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan assesment test terhadap pegawai yang memiliki kemampuan analisa hukum yang memadai.
 - b. Untuk mendorong terlaksananya kebijakan pemerintah yang memenuhi dan menghormati HAM diseluruh wilayah Sulawesi Tenggara, maka para pejabat yang berwenang menetapkan kebijakan pemerintah harus memahami dan meresponi nilai-nilai hak asasi manusia melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi hak asasi manusia. Agar implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, maka setiap kebijakan yang diberlakukan pemerintah daerah harus dikendalikan dan diharmonisasikan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara selaku koordinator RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) tingkat daerah.
6. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang Keimigrasian pada tahun berikutnya, disarankan untuk:

- a. Seluruh aparaturnya Keimigrasian harus melakukan pembenahan birokrasi, baik secara internal maupun eksternal
- b. Melakukan inovasi di bidang pelayanan publik Keimigrasian, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan.
- c. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik.
- d. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan Keimigrasian.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Bambang Rantam Sariwanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Dr. Bambang Rantam Sariwanto
NIP. 196012151988021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	7,1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	85

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 14.648.634.000

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Dr. Bambang Rantam Sariwanto
NIP. 196012151988021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Sri Puguh Budi Utami
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Dr. Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan di wilayah	7,0
2.	Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri	Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%
3.	Terwujudnya Mantan Narapidana/anak yang taat hukum	Menurunnya persentase residivis di wilayah	1%
4.	Terwujudnya pemenuhan hak anak	Persentase anak yang melanjutkan Pendidikan di wilayah	55%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 72.931.198.000

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Pemasyarakatan



Dr. Sri Puguh Budi Utami
 NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara



Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
 NIP. 196410241985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Ronny F. Sompie, S.H.,M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Dr. Ronny F. Sompie, S.H.,M.H.
NIP. 196109172015081001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah.	7,3
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 17.854.328.000

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi



Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H.
NIP. 196109172015081001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara



Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan


Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Tenggara


Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002

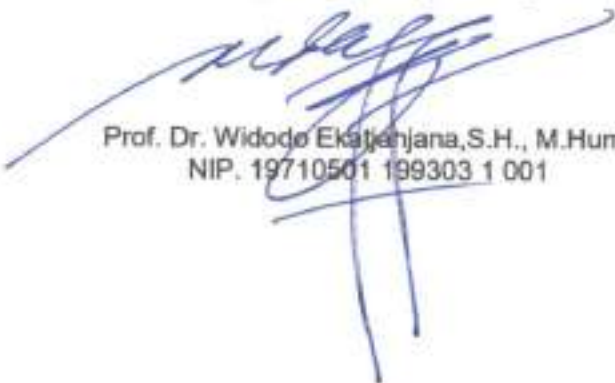
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	20 Raperda
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	17 orang


No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	Rp. 119.187.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan


Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Tenggara


Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Tenggara

Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	138 Orang
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	17 Kegiatan
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 1.723.869.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Tenggara



Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Muallimin Abdi, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal HAM

Dr. Muallimin Abdi, S.H., M.H.
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Wilayah.	3 Rekomendasi

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 239.412.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal HAM



Dr. Muallimin Abdi, S.H., M.H.
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara



Sofyan, S.Sos, S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.
NIP. 196611191986031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002

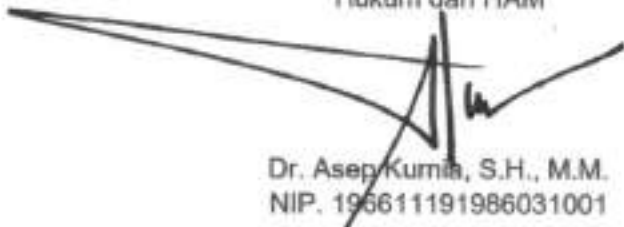
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 58.221.000,-

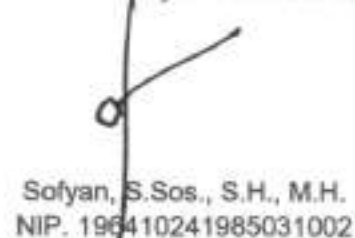
Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM



Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.
NIP. 196611191986031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara



Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

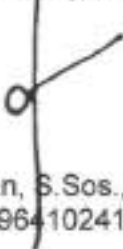
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara


Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 196410241985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	10 Jumlah Permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 704.732.000,-

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
 NIP. 196611181994031001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara



Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
 NIP. 196410241985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvester Sili Laba, S.H.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2020

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Silvester Sili Laba
NIP. 196701061993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.128.000.000,-

Jakarta, November 2020

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Administrasi
 Hukum Umum



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., L.L.M.
 NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara



Silvester Sili Laba
 NIP. 196701061993031001